

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024



**BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR
DAN PENYULUHAN PERIKANAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA
KELAUTAN DAN PERIKANAN
BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR DAN
PENYULUHAN PERIKANAN**

JALAN SEMPUR NO.1 BOGOR 16129 TELP: (0251) 8313200, FAX: (0251) 8327890
Email : brpbat@yahoo.com

**KEPUTUSAN
KEPALA BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR
DAN PENYULUHAN PERIKANAN
NOMOR: 239/BRSDM-BRPBATPP/RC.221/VII/2021**

**TENTANG
RENCANA STRATEGIS BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR
TAWAR DAN PENYULUHAN PERIKANAN TAHUN 2020 – 2024 SEBAGAI
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BALAI RISET PERIKANAN
BUDIDAYA AIR TAWAR DAN PENYULUHAN PERIKANAN
NOMOR 367/BRSDM-BRPBATPP/RC.221/X/2020 TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KEPALA BRPBATPP NOMOR
214/BRSDM-BRPBATPP/RC.221/V/2020 TENTANG RENCANA
STRATEGIS BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR
DAN PENYULUHAN PERIKANAN
TAHUN 2020 – 2024**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kegiatan penyelarasan program Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan dengan redesain sistem perencanaan dan penganggaran (RSPP) di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan perlu mengatur kembali Keputusan Kepala BRPBATPP Nomor SK 367/BRSDM-BRPBATPP/RC.221/X/2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Kepala BRPBATPP Nomor 214/BRSDM-BRPBATPP/RC.221/V/2020 Tentang Rencana Strategis Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan Tahun 2020–2024.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan Nomor SK 367/BRSDM-BRPBATPP/RC.221/X/2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Kepala BRPBATPP Nomor

214/BRSDM-BRPBATPP/RC.221/V/2020 Tentang Rencana Strategis Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan Tahun 2020 – 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 2. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015;
 3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 74/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan;
 4. Peraturan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor 180/Per-BRSDM/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor 12/PER-BRSDM/2020 Tentang Rencana Strategis Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Tahun 2020 - 2024;
 5. Surat Keputusan Kepala Pusat Riset Perikanan Nomor 340/BRSDM.3/RC.221/VI/2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Kepala Pusat Riset Perikanan Nomor 394/BRSDM.3/RC.221/V/2020 Tentang Rencana Strategis Pusat Riset Perikanan Tahun 2020 - 2024;
 6. Surat Keputusan Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Nomor SK 311/BRSDM.05/RC.221/V/2021 tentang Rencana Strategis Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Tahun 2020–2024 Sebagai Perubahan Atas Keputusan Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Nomor 622/BRSDM.05/RC.221/VII/2020 Tentang Rencana Strategis Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Tahun 2020 – 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR DAN PENYULUHAN PERIKANAN TENTANG RENCANA STRATEGIS BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR DAN PENYULUHAN PERIKANAN TAHUN 2020–2024

SEBAGAI PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR DAN PENYULUHAN PERIKANAN NOMOR 367/BRPDM-BRPBATPP/RC.221/X/2020 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KEPALA BRPBATPP NOMOR 214/BRSDM-BRPBATPP/RC.221/V/2020 TENTANG RENCANA STRATEGIS BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR DAN PENYULUHAN PERIKANAN TAHUN 2020-2024.

Pasal 1

Mengubah Lampiran I dan II pada Keputusan Kepala Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan Nomor 367/BRPDM-BRPBATPP/RC.221/X/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Kepala BRPDM-BRPBATPP NOMOR 214/BRSDM-BRPBATPP/RC.221/V/2020 Tentang Rencana Strategis Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar Dan Penyuluhan Perikanan Tahun 2020-2024 serta menambahkan Lampiran III dan IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala BRPDM-BRPBATPP ini.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan akan dilakukan perubahan seperlunya.

Ditetapkan di Bogor
Pada tanggal: 19 Juli 2021
Kepala Balai Riset Perikanan Budidaya
Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan,



Dr. Arif Wibowo, S.P., M.Si.

Lampiran I.

Keputusan Kepala Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan Nomor : 239/BRSDM-BRPBATPP/RC.221/VII/2021 Tentang Rencana Strategis Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan Tahun 2020 – 2024 Sebagai Perubahan Atas Keputusan Kepala Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan Nomor 367/BRSDM-BRPBATPP/RC.221/X/2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Kepala BRPBATPP Nomor 214/BRSDM-BRPBATPP/RC.221/V/2020 Tentang Rencana Strategis Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan Tahun 2020 – 2024

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan keempat sekaligus periode terakhir dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang telah ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025. RPJPN menjadi sarana memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia (SDM) berkualitas, serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang terus meningkat.

Tujuan pembangunan kelautan dan perikanan (KP) jangka panjang pada periode pembangunan tahap ke 4 (2020-2024) adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing. Hal ini ditegaskan dalam misi ketujuh pembangunan nasional yaitu mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju dengan basis

kepentingan Nasional. Misi tersebut selaras dengan salah satu sasaran pokok RPJPN 2005-2025, yaitu *“Terwujudnya Indonesia sebagai negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional”*. RPJMN 2020-2024 akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN, dimana pendapatan perkapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas (*upper-middle income country/MIC*) yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan (BRPBATPP) tahun 2020-2024, mengacu pada Renstra Pusat Riset Perikanan dan Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan yang berada di bawah Badan Riset dan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM KP). Visi kementerian kelautan dan perikanan pada tahun 2020-2024 adalah mendukung visi presiden untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong. Visi KKP menjadi penting dengan keberadaan BRPBATPP sebagai lembaga pendukung untuk mencapai tujuan RPJMN tahap IV. Peran strategis keberadaan BRPBATPP yaitu mendukung visi dan misi KKP melalui kegiatan riset dan penyuluhan.

Pembentukan BRSDM KP termasuk didalamnya BRPBATPP selaras dengan pengembangan dan pembangunan sektor kelautan dan perikanan di masa mendatang dimana peran riset dan Iptek sangat dibutuhkan masyarakat. Pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi disertai lompatan inovasi telah berpengaruh secara signifikan terhadap perkembangan dunia harus dimanfaatkan sektor kelautan dan perikanan, termasuk di dalamnya masyarakat pemanfaat untuk mendorong akselerasi pertumbuhannya.

Keberadaan BRPBATPP sendiri memiliki peran yang strategis dalam mendukung visi dan misi KKP dan BRSDM KP melalui kegiatan riset perikanan budidaya air tawar sebagai berikut :

1. Meningkatkan riset yang inovatif dan implementatif melalui riset perikanan budidaya air tawar di bidang perbenihan dan genetika populasi, nutrisi dan teknologi pakan, kesehatan ikan, lingkungan, toksikologi, teknologi budidaya, dan identifikasi kelayakan lahan budidaya air tawar;
2. Pengembangan teknologi perikanan budidaya air tawar;
3. Meningkatkan *Knowledge Base Management System* dalam mengaplikasikan hasil riset perikanan budidaya air tawar;

4. Mewujudkan *Research Extension Linkage* (REL) sebagai dasar kegiatan penyuluhan yang maju, kuat dan mandiri;
5. Mewujudkan tata kelola dan kerja sama dalam riset perikanan secara efektif dan efisien.

Sementara itu di bidang penyuluhan perikanan, BRPBATPP memiliki peran penting dalam mendukung visi dan misi KKP dan BRSDM KP melalui:

1. Peningkatkan keterampilan dan kompetensi SDM sehingga dapat meningkatkan produksi dan produktivitas, nilai tambah dan daya saing produk kelautan dan perikanan secara optimal melalui pelatihan dan sertifikasi;
2. Mewujudkan pelaku utama yang mandiri, kompeten, sadar dan peduli terhadap inovasi teknologi, kelestarian dan keberlanjutan sumberdaya kelautan dan perikanan;
3. Membantu dalam meningkatkan ekonomi para pelaku usaha melalui penumbuhan dan pembentukan usaha mikro, kecil dan koperasi sektor kelautan dan perikanan; serta
4. Meningkatkan pengelolaan alih teknologi bidang kelautan dan perikanan secara efektif dan efisien dan tepat sasaran melalui diseminasi dan pelatihan.

Salah satu kenyataan yang dihadapi pada sektor perikanan umumnya usaha perikanan didominasi oleh usaha skala kecil, tingkat pendidikan pembudidaya ikan, pengolah ikan maupun nelayan (pelaku utama) masih rendah, dan bermodal kecil. Kondisi dengan skala usaha kecil umumnya belum mampu menerapkan teknologi inovatif sehingga menjadi kurang efisien dan akan berakibat pada penurunan kuantitas maupun kualitas produk yang dihasilkan. Hal utama yang harus dicermati adalah bahwa keberhasilan pembangunan perikanan sangat tergantung pada perubahan perilaku pelaku utama dalam menyikapi tantangan tersebut. Selain peningkatan sumberdaya manusia yang berkualitas, penyuluhan perikanan mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam pembangunan perikanan, karena mempunyai tugas dan fungsi untuk menyelenggarakan pendidikan non formal bagi pelaku utama beserta keluarganya serta anggota masyarakat lainnya.

B. Kondisi Umum

1. Kegiatan Riset KP Tahun 2015 – 2020

Dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan KP dilaksanakan melalui proses yang bertahap, terencana, terpadu dan

berkesinambungan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 telah menetapkan salah satu misi yang terkait dengan KKP, yakni “Mewujudkan Indonesia menjadi Negara Kepulauan yang Mandiri, Maju, Kuat, dan Berbasis Kepentingan Nasional”, dengan menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang berwawasan kelautan, mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan kedaulatan dan meningkatkan kemakmuran, dan membangun ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan.

Berdasarkan hal tersebut, BRPBATPP telah melaksanakan berbagai kegiatan di bidang riset dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 1.1. Target dan capaian kinerja Kegiatan Riset Perikanan BRPBATPP Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	TARGET					CAPAIAN				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	Sarana dan Prasarana	1	2	1	-	1	1	2	1	-	1
2	Karya Tulis Ilmiah	35	-	20	20	30	38	-	31	36	36
3	Paket Teknologi / Inovasi Teknologi	1	-	1	1	5	1	-	1	1	5
4	Produk Biologi	11	-	-	-	1	11	-	-	-	1
5	Bahan Usulan HKI/	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
6	Komponen Teknologi	10	-	1	1	-	10	-	1	1	-
7	Data dan/atau Informasi	8	1	1	1	1	8	1	1	1	1
8	Rilis Varietas Unggul	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
9	Inovasi Teknologi Adaptif Lingkungan	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
10	Hasil Riset yang dimanfaatkan oleh Sektor Industri	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1

2. Kegiatan Penyuluhan KP Tahun 2018 – 2020

Kegiatan Penyuluhan KP mulai masuk ke dalam DIPA BRPBATPP pada tahun 2018. Adapun Indikator Kinerja/Output dan capaiannya

untuk tahun 2018 – 2020 yang menjadi tanggung jawab BRPBATPP dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 1.2. Target dan capaian kinerja Kegiatan Penyuluhan KP BRPBATPP Tahun 2018 – 2020

NO	INDIKATOR	TARGET			CAPAIAN		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020
1	Tenaga Penyuluh Yang Melakukan Penyuluhan	220	455	-	220	455	-
2	Kelompok pelaku utama/usaha yang mendapatkan penyuluhan	4.478	3.411	3.464	4.478	3.411	3.520
3	Percontohan Penyuluhan KP	1	3	1	1	3	1
4	Legalisasi Izin Usaha Mikro Kecil dan Pendirian Koperasi Sektor KP	681	636	-	681	636	-
5	Kelompok yang dinilai kelas kelompoknya	-	-	205	-	-	246
6	Calon kelompok pelaku utama yang disiapkan untuk ditumbuhkan menjadi kelompok pelaku utama perikanan	-	-	215	-	-	258
7	Usaha Mikro Kecil dan Koperasi Sektor KP yang dibina	-	-	576	-	-	580

C. Potensi Dan Permasalahan

1. Potensi

1.1 Organisasi

Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan (BRPBATPP) berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 74/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan yang menangani riset dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan, yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan riset perikanan budidaya air tawar dan penyuluhan perikanan dan memiliki fungsi sebagai berikut :

- penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan dibidang riset perikanan budidaya air tawar dan penyuluhan perikanan;
- pelaksanaan riset perikanan budidaya air tawar dibidang perbenihan dan genetik populasi, nutrisi dan teknologi pakan,

- kesehatan ikan, lingkungan, toksikologi, teknologi budidaya, dan identifikasi kelayakan lahan budidaya air tawar;
- c. pengembangan teknologi perikanan budidaya air tawar;
 - d. penyusunan materi, metodologi, pelaksanaan penyuluhan perikanan, serta pengembangan dan fasilitasi kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
 - e. penyusunan kebutuhan peningkatan kapasitas penyuluh pegawai negeri sipil, swadaya, dan swasta;
 - f. pengelolaan prasarana dan sarana riset perikanan budidaya air tawar dan penyuluhan perikanan; dan
 - g. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

BRPBATPP dipimpin oleh seorang Kepala Balai. Susunan organisasi Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan terdiri atas :

- a. Subbagian Umum; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sub bagian umum mempunyai tugas melakukan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, pelaporan, urusan keuangan, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, persuratan, kearsipan, dokumentasi, rumah tangga, serta pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan.

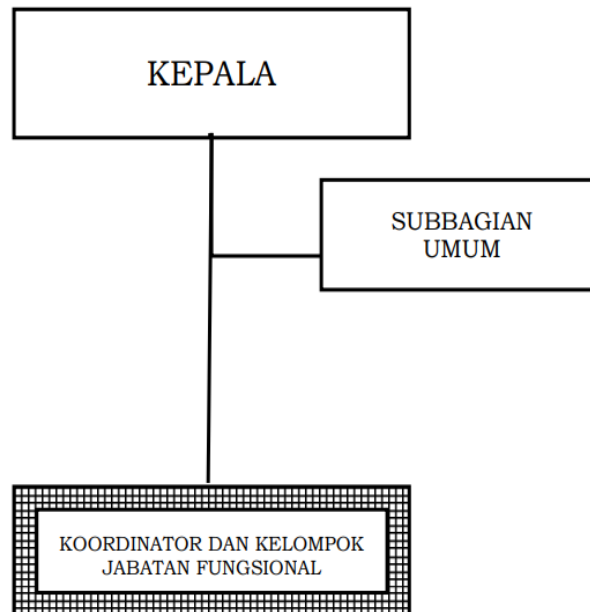
Sedangkan kelompok jabatan fungsional memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

Kelompok jabatan fungsional dalam pelaksanaan tugasnya ditetapkan Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan.

Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan masing-masing fungsional sesuai dengan bidang tugas Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan.

Struktur organisasi BRPBATPP berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 74/PERMEN-KP/2020 dapat dilihat pada Gambar 2 dibawah ini.

**STRUKTUR ORGANISASI
BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR DAN
PENYULUHAN PERIKANAN**



Gambar 1.1. Struktur Organisasi BRPBATPP

1.2 Sumberdaya

a. Sumberdaya Manusia

Sumberdaya manusia yang mendukung kinerja BRPBATPP meliputi fungsional tertentu dan fungsional umum (administrasi). Fungsional tertentu terdiri dari : (1) Peneliti; (2) Penyuluh Perikanan; (3) Litkayasa; (4) Pustawakan, (5) Perencana, (6) Analis Pengelolaan Keuangan APBN, (7). Analis Kepegawaian, (8) Pranata Hubungan Masyarakat, (9) Pranata Keuangan APBN, (10) Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli, dan (11) Arsiparis. Jabatan Fungsional Peneliti yang tergabung di BRPBATPP terdiri dari profesor riset, peneliti utama, peneliti madya, peneliti muda dan peneliti pertama yang tergabung dalam 4 (empat) kelompok peneliti (Kelti) yaitu : (1) Kelti Perbenihan dan Genetika Populasi, (2) Kelti Nutrisi dan Teknologi Pakan, (3) Kelti Kesehatan Ikan, dan (4) Kelti Teknologi Budidaya, Lingkungan, dan Toksikologi.

Jabatan Fungsional Penyuluh perikanan yang tergabung di BRPBATPP terdiri dari : (1) Penyuluh Perikanan Madya ; (2) Penyuluh Perikanan Muda; (3) Penyuluh Perikanan Pertama; (4) Penyuluh

Perikanan Penyelia; (5) Penyuluh Perikanan Pelaksana Lanjutan; dan (6) Penyuluh Perikanan Pelaksana dengan wilayah kerja tersebar di 3 (tiga) Propinsi, yaitu Propinsi Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta.

Jabatan Fungsional Litkayasa yang ada di BRPATPP terdiri dari : (1) Litkayasa Penyelia; (2) Litkayasa Pelaksana Lanjutan; dan (3) Litkayasa Pelaksana. Jabatan Fungsional Perencana di BRPBATPP terdiri dari : (1) Perencana Ahli Muda, dan (2) Perencana Ahli Pertama. Jabatan fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN terdiri dari : (1) Analis Pengelolaan Keuangan APBN ahli muda, dan (2) Analis Pengelolaan Keuangan APBN ahli pertama. Jabatan Fungsional Kepegawaian terdiri dari : (1) Analis Kepegawaian ahli muda, dan (2) Analis Kepegawaian ahli pertama. Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat terdiri dari : (1) Pranata Hubungan Masyarakat ahli muda, dan (2) Pranata Hubungan Masyarakat ahli pertama. Jabatan fungsional lainnya yang ada di BRPBATPP antara lain : Pustakawan yang berada pada jenjang muda, Pranata Keuangan APBN pada jenjang pertama, Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli, pada jenjang pertama, dan Arsiparis pada jenjang muda.

Jumlah pegawai pada masing-masing jabatan fungsional dapat dilihat pada Tabel 1.3. dibawah ini:

Tabel 1.3. Jumlah Pegawai BRPBATPP Berdasarkan Jabatan Fungsional

No.	Uraian	Jumlah Orang
1.	Peneliti	36
2.	Penyuluh Perikanan	153
3.	Litkayasa	12
4.	Pustakawan	1
5.	Perencana	3
6.	Arsiparis	1
7.	Analis Kepegawaian	4
8.	Analis Pengelolaan Keuangan APBN	2
9.	Pranata Keuangan APBN	3
10.	Pranata Hubungan Masyarakat	2
11.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli	1
12.	Fungsional Umum	22
	Jumlah Total	240

Sumber : Data Kepegawaian BRPBATPP per Juni 2021

b. Sumberdaya Sarana-Prasarana

Prasarana dan sarana pendukung untuk kegiatan BRPBATPP antara lain adalah tanah, bangunan kantor, hatchery dan kolam percobaan untuk menghasilkan teknologi budidaya air tawar yang aplikatif dan efisien, ruang pertemuan, perpustakaan, dan laboratorium terakreditasi dari Komite Akreditasi Nasional (KAN) sebagai Laboratorium Penguji karena telah menerapkan secara konsisten SNI ISO/IEC 17025:2008 (ISO/IEC 17025:2005). Beberapa laboratorium yang dimiliki oleh BRPBATPP antara lain adalah : (1) Lab Reproduksi dan Genetika Ikan, (2) Lab Nutrisi dan Teknologi Pakan, (3) Lab Lingkungan dan Toksikologi, dan (4) Lab Kesehatan Ikan. Beberapa aset yang dimiliki oleh BRPBATPP s/d semester 1 tahun 2021 adalah sebagai berikut.

Tabel 1.4. Aset BRPBATPP Per Semester 1 Tahun 2021

No.	Nama Aset	Kuantitas	Nilai (Rp.)
A	Tanah		95,685,186,000
1	Tanah Persil (m ²)	16,345	52,488,531,000
2	Tanah Non Persil (m ²)	35,940	43,196,655,000
B	Peralatan dan Mesin		33,932,052,664
1	Alat Besar Darat (unit)	2	141,843,934
2	Alat Bantu (unit)	66	271,759,424
3	Alat Angkutan Darat Bermotor (unit)	11	2,098,367,648
4	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor (unit)	3	2,117,663
5	Alat Bengkel Bermesin (unit)	1	4,500,000
6	Alat Ukur (unit)	38	118,334,065
7	Alat Pengolahan (unit)	339	769,834,310
8	Alat Kantor (unit)	312	983,805,374
9	Alat Rumah Tangga (unit)	2159	3,897,346,293
10	Alat Studio (unit)	25	195,642,305
11	Alat Komunikasi (unit)	18	33,850,000
12	Peralatan Pemancar (unit)	5	1,013,689,014
13	Alat Kedokteran (unit)	23	1,199,925,436
14	Unit Alat Laboratorium (unit)	864	20,393,767,751
15	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir (unit)	17	658,775,273
16	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika (unit)	5	143,332,060
17	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup (unit)	26	355,237,573

No.	Nama Aset	Kuantitas	Nilai (Rp.)
18	Peralatan Laboratorium Hydrodinamika (unit)	1	12,635,000
19	Alat Laboratorium Standardisasi Kalibrasi (unit)	7	81,376,102
20	Persenjataan Non Senjata Api (unit)	1	12,430,000
21	Alat Khusus Kepolisian (unit)	2	24,860,000
22	Komputer Unit (unit)	97	1,058,954,221
23	Peralatan Komputer (unit)	63	247,215,535
24	Alat Pelindung (unit)	2	841,565
25	Alat Kerja Penerbangan (unit)	1	20,724,000
26	Unit Peralatan Proses/Produksi (unit)	77	190,888,118
C	Gedung dan Bangunan		42,713,003,500
1	Bangunan Gedung Tempat Kerja (unit)	96	38,650,306,500
2	Bangunan Gedung Tempat Tinggal (unit)	21	2,076,950,000
3	Tugu/Tanda batas (unit)	11	1,985,747,000
D	Jalan dan Jembatan		381,691,000
1	Jalan (m ²)	1,887	245,882,000
2	Jembatan (m ²)	30	135,809,000
E	Irigasi		662,585,000
1	Bangunan Air Irigasi (unit)	17	468,489,000
2	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai (unit)	13	32,319,000
3	Bangunan Pengembangan Sumber Air (unit)	2	157,784,000
4	Bangunan Air Bersih / Baku (unit)	1	3,993,000
F	Jaringan		1,007,968,320
1	Instalasi Air Bersih (unit)	1	49,939,700
2	Instalasi Gardu Listrik (unit)	2	328,572,170
3	Instalasi Gas (unit)	1	5,055,000
4	Jaringan Listrik (unit)	2	624,401,450
G	Aset Tetap Lainnya		275,652,000
1	Bahan Perpustakaan Tercetak (unit)	375	250,652,000
2	Barang Bercorak Kesenian (unit)	1	25,000,000
H	Aset Tak Berwujud		1,068,989,400
1	Paten (buah)	13	1,068,989,400
	Jumlah Total		175,727,127,884

Sumber : Data BMN BRPBATPP Semester 1 Tahun 2021

c. Anggaran

Penganggaran BRPBATPP sesuai Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, menggunakan pendekatan penganggaran terpadu (*unified budget*), kerangka pengeluaran jangka menengah (*medium term expenditure framework*), dan penganggaran berbasis kinerja (*performance-based budgeting*). Anggaran untuk kegiatan riset perikanan dan penyuluhan perikanan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Anggaran ini berasal dari dua (2) Eselon II / Pusat yaitu : (1) Pusat Riset Perikanan untuk kegiatan riset; dan (2) Pusat Pelatihan dan Penyuluhan untuk kegiatan penyuluhan. Anggaran BRPBATPP pada tahun 2016 sampai dengan 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.5. Anggaran BRPBATPP TA.2016-2020

No.	Jenis Belanja	Pagu Anggaran Tahun (Rp.000)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Belanja Pegawai	12.443.192	7.944.414	55.321.876	48.374.369	41.267.109
2.	Belanja Barang	11.266.513	4.422.257	12.366.286	18.833.404	15.899.721
3.	Belanja Modal	1.261.600	1.286.770	4.351.472	-	132.824
Total Anggaran		24.971.305	13.653.441	72.039.634	67.207.773	57.299.654

Sumber : Data DIPA BRPBATPP Tahun 2016 - 2020

Pada tahun 2017, anggaran BRPBATPP mengalami penurunan sebesar Rp. 11.317.864.000,- (45,32%) dari tahun 2016 yaitu untuk anggaran kegiatan riset yang merupakan dampak dari penggabungan dua eselon I yaitu antara BPSDM dengan Balitbang KP. Sedangkan pada tahun 2018, anggaran BRPBATPP mengalami peningkatan sebesar Rp. 58.386.193.000,- (427,63%). Peningkatan ini disebabkan oleh bergabungnya penyuluh perikanan dari 3 Propinsi (Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat) sebanyak 227 orang dibawah Satminkal Bogor sehingga belanja pegawai meningkat drastis. Kemudian pada tahun 2019, anggaran BRPBATPP mengalami penurunan sebesar Rp. 4.831.861.000,- (6,71%) yang disebabkan oleh menurunnya belanja pegawai karena berkurangnya jumlah penyuluh perikanan menjadi 183 orang serta tidak adanya belanja modal. Pada tahun 2020, anggaran BRPBATPP kembali mengalami penurunan sebesar Rp. 9.908.119.000,- (14,74%) yang disebabkan oleh menurunnya belanja pegawai karena

berkurangnya jumlah penyuluh perikanan menjadi 163 orang serta menurunnya belanja barang.

d. Bidang Riset

Selain potensi SDM, prasarana dan sarana, serta anggaran yang dimiliki oleh BRPBATPP, potensi lain yang dimiliki adalah potensi sebagai lembaga riset. BRPBATPP menjadi Pusat Unggulan Iptek bidang teknologi budidaya air tawar yang ditetapkan oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi melalui Keputusan Menteri No.381/M/KPT/2018 tentang “Penetapan Lembaga Litbang Sebagai Pusat Unggulan IPTEK Tahun 2018, Perpanjangan Status Lembaga Litbang Sebagai Pusat Unggulan IPTEK Tahun 2020-2021, dan Lembaga Litbang yang Dibina Menjadi Pusat Unggulan IPTEK tahun 2020-2021.

e. Bidang Penyuluhan

Untuk melaksanakan fungsinya dalam melakukan penyuluhan, BRPBATPP memiliki penyuluh perikanan yang telah melakukan tugas pada periode 2018 – 2020 diantaranya sebagai berikut:

1. Pendampingan Kelompok (KUB, POKDAKAN, POKLAHSAR dan KUGAR) dalam akses teknologi, informasi dan permodalan usaha KP;
2. Penumbuhan dan peningkatan kelas kemampuan kelompok (KUB, POKDAKAN, POKLAHSAR dan KUGAR);
3. Pendampingan bantuan pemerintah (asuransi nelayan/pembudidaya ikan, sertifikat tanah nelayan, sarana alat tangkap ikan, minapadi, bioflok, integrasi lahan garam rakyat, ice flake, dll.);
4. Pendirian Koperasi (nelayan, pembudidaya ikan, pengolah/pemasar dan petambak garam);
5. Legalisasi Izin Usaha Mikro dan Kecil/IUMK sektor KP) (nelayan, pembudidaya ikan, pengolah/pemasar dan petambak garam);
6. Sosialisasi peraturan per-UU perikanan;
7. Pendataan Pelaku Usaha KP (KUSUKA) dan sampling produksi (perikanan tangkap, budidaya, pengolah/pemasar dan petambak garam) dalam Satu Data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Sampai dengan akhir Juni 2021, jumlah penyuluh perikanan yang terdapat di BRPBATPP adalah sebanyak 356 orang yang terdiri dari 150 PNS dan 206 PPB (Penyuluh Perikanan Bantu) yang tersebar di 40 Kabupaten / Kota di 3 propinsi, yaitu Prop. Banten, Prop. DKI Jakarta dan Prop. Jawa Barat.

2. Permasalahan

Masalah dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program riset dan penyuluhan Perikanan untuk mendukung pembangunan KP antara lain :

- 1) Kerangka regulasi yang mengikat untuk pemanfaatan hasil riset oleh Ditjen teknis sebagai landasan penyusunan kebijakan, sehingga peran BRPBATPP untuk mendukung BRSDM sebagai Inhouse Consultant lebih optimal, belum tersedia.
- 2) Sarana dan prasarana Riset belum sepenuhnya ter-update mengikuti perkembangan kebutuhan riset.
- 3) Kegiatan dan pemanfaatan hasil riset yang terintegrasi lintas eselon I dan eselon II lingkup BRSDM belum sepenuhnya terbangun.
- 4) Masih terjadi alih tugas penyuluh perikanan PNS menjadi jabatan lainnya;
- 5) Kompetensi sebagian penyuluh perikanan masih belum sesuai kebutuhan di lapangan;
- 6) Penyebaran penyuluh perikanan tidak merata di semua kabupaten/kota potensi perikanan;
- 7) Sistem monitoring terhadap penyuluh perikanan masih belum memadai karena cakupan wilayah terlalu luas dengan anggaran monitoring yang kurang memadai.

D. Lingkungan Strategis

BRPBATPP memiliki mandat untuk melaksanakan program riset perikanan, khususnya riset perikanan budidaya air tawar. Fokus riset yang dikembangkan adalah riset pada ikan air tawar spesifik lokal potensial atau ikan-ikan asli perairan Indonesia yang memiliki potensi untuk dijadikan komoditas nasional bahkan ekspor, contohnya yaitu ikan tor, baung, gabus, gurame, tapah, udang galah dan lain-lain. Pengembangan ikan-ikan lokal dimulai dengan identifikasi, karakterisasi dan domestikasi untuk selanjutnya dilakukan riset terhadap reproduksi dan produksi massalnya di masyarakat. Disamping itu BRPBATPP juga masih melakukan riset lanjutan pada ikan introduksi yang sudah dibudidayakan secara massal di masyarakat terutama terkait pengembangan vaksin, immunostimulan dan pakan ikan. Penyelenggaraan riset perikanan budidaya air tawar ini dilakukan secara terpadu dengan tata kelola yang baik (*good governance*). Dalam menjalankan mandat tersebut BRPBATPP harus memperhatikan perkembangan lingkungan strategis sehingga

mempengaruhi pencapaian kinerja pembangunan sektor perikanan di Indonesia, khususnya yang didorong melalui peran riset perikanan.

Secara teoritis, lingkungan strategis ini dapat diartikan sebagai situasi faktor yang strategis baik internal maupun eksternal yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan BRPBATPP yang telah ditetapkan untuk periode ke depan (tahun 2020-2024). Dalam hal ini, yang dimaksud dengan situasi faktor yang strategis tersebut adalah faktor-faktor strategis yang bersumber dari internal (*Internal Factor Strategic*) maupun eksternal (*External Factor Strategic*) baik yang bersifat statis maupun dinamis yang tercakup dalam perspektif wilayah baik di tingkat global, regional, nasional maupun sektoral. Faktor-faktor strategis internal tersebut meliputi faktor-faktor strategis yang berhubungan dengan kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weaknes*) BRPBATPP, sedangkan faktor-faktor strategis eksternal meliputi faktor-faktor strategis yang berhubungan dengan peluang (*opportunity*) dan ancaman (*threats*) BRPBATPP.

Berikut diuraikan situasi internal dan eksternal dalam lingkungan strategis yang dihadapi BRPBATPP yaitu :

(1) Faktor Strategis Lingkungan Eksternal di Tingkat Global

Perkembangan era globalisasi saat ini telah menghantarkan kita pada sebuah tatanan kehidupan dunia di mana tidak ada lagi batas nyata dalam tata kehidupan masyarakat yang ditopang oleh masifnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Dunia menjadi sangat terbuka, sehingga perlu diamati dengan seksama bahwa setiap perubahan yang terjadi dalam konteks kehidupan global saat ini memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan nasional, termasuk yang terjadi di sektor perikanan. Globalisasi, mengharuskan Indonesia membuka diri terhadap negara lain sehingga kerja sama antar negara dalam berbagai hal menjadi sesuatu kebutuhan, termasuk kerja sama dalam riset dan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia di sektor perikanan. Sudut pandang produksi juga dapat ditinjau dari peningkatan kualitas dan kuantitas pelaku utama KP yang diwujudkan melalui kegiatan penyuluhan.

(2) Faktor Strategis Lingkungan Eksternal di Tingkat Regional

Dinamika perubahan kondisi ekonomi, sosial dan politik yang terjadi di dunia mempengaruhi kondisi lingkungan strategis di tingkat regional di beberapa negara termasuk Indonesia. Lingkungan startegis tersebut merupakan faktor eksternal, baik berupa peluang

(opportunity) maupun ancaman (threats). Kerjasama ekonomi dan perdagangan yang bersifat regional, baik antara Indonesia dengan beberapa negara yang bersifat multilateral seperti ASEAN, APEC dan MEA, maupun antar negara yang bersifat bilateral. Sedangkan lingkungan strategis di tingkat regional yang berhubungan dengan aspek lingkungan hidup dan sumberdaya perikanan.

Faktor strategis lingkungan eksternal di tingkat regional dapat menjadi peluang (opportunity) ataupun ancaman (threats) terhadap pembangunan sektor perikanan di Indonesia, seperti : (1) Permintaan hasil perikanan dunia; (2) Sumberdaya alam, praktek dan tingkat produksi perikanan dunia, (3) Globalisasi perekonomian, serta pasar bebas hasil perikanan regional dan dunia; (4) Masyarakat Ekonomi ASEAN; (5) Kerja sama bilateral, regional dan multilateral, serta instrumen internasional (termasuk RFMO); (6) Praktek Illegal fishing global; (7) Sumberdaya alam, praktik dan tingkat produksi dan pengelolaan perikanan dunia, pasok hasil perikanan dunia; dan (8) Kependudukan dunia.

(3) Faktor Strategis Lingkungan Internal di Tingkat Nasional

Faktor strategis lingkungan internal di tingkat nasional dapat dilihat dari perspektif ketahanan nasional yang lebih difokuskan pada aspek: (a) Geografi; (b) Sumber kekayaan alam; dan (c) Ekonomi dengan uraian tiap aspek sebagai berikut :

a. Geografi

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara kepulauan yang terdiri dari 17.504 pulau besar dan kecil terhampar pada wilayah nusantara. Dalam Deklarasi Juanda pada tahun 1957, Indonesia memiliki wilayah laut sekitar 70 persen dari seluruh wilayah atau 5,83 juta km², dan seluas 2,03 juta km² merupakan wilayah daratan. Kondisi geografis ini memerlukan suatu upaya untuk menjaga dan menyatukan wilayah nusantara dari seluruh komponen masyarakat untuk menjadikannya sebagai suatu kekuatan (strength), namun tetap menjaga dan mengatasinya sebagai suatu kelemahan (weakness), khususnya melalui pembangunan perikanan nasional.

b. Sumber Kekayaan Alam

Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam melimpah, yang terkait dengan sektor perikanan, meliputi: Potensi lestari sumber daya ikan laut Indonesia diperkirakan sebesar 7,3 juta ton per tahun di

perairan wilayah Indonesia dan perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) dengan jumlah tangkapan yang diperbolehkan (JTB) sebesar 5,8 juta ton per tahun atau sekitar 80 persen dari potensi lestari, dan baru dimanfaatkan sebesar 5,4 juta ton pada tahun 2013 atau baru 93% dari JTB, Potensi luas areal budidaya air tawar saat ini tercatat 2.830.540 Ha; Potensi di perairan umum daratan (sungai dan danau), dengan tingkat pemanfaatan 302.130 Ha (10,7%); Potensi luas areal budidaya air payau saat ini tercatat 2.964.331 Ha, dengan tingkat pemanfaatan 650.509 Ha (21,9%); Potensi luas areal budidaya laut saat ini tercatat 12.123.383 Ha.

c. Ekonomi

Gerakan ekonomi kerakyatan sesungguhnya dapat digunakan untuk mengakomodasi lini produktif masyarakat melalui optimalisasi sektor riil memerlukan sebuah mekanisme untuk mendorong kerja kolektif masyarakat sehingga dapat mendorong terjalannya rasa kebersamaan yang akan meminimalisir ancaman konflik masyarakat. Koperasi merupakan gambaran dari ekonomi kerakyatan sebagai salah satu alat efektif untuk penanggulangan kemiskinan masyarakat. Koperasi dan ekonomi kerakyatan sudah selayaknya dijadikan sebagai pedoman kehidupan perekonomian nasional.

Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) serta dinamika globalisasi ekonomi, pemerintah menggulirkan paket-paket kebijakan ekonomi. Paket kebijakan ekonomi bertujuan untuk mengembangkan kondisi makro ekonomi, menggerakkan ekonomi nasional (sektor riil), dan melindungi masyarakat berpendapatan rendah dan jaminan sosial. Paket kebijakan ekonomi difokuskan pada kebijakan deregulasi, penegakan hukum dan kepastian usaha untuk meningkatkan daya saing industri dan peningkatan ketahanan dan kekuatan ekonomi nasional.

Paket kebijakan ekonomi tersebut memiliki implikasi terhadap faktor lingkungan internal, baik berupa kekuatan (strength) maupun kelemahan (weakness) yang akan mempengaruhi tujuan pembangunan KP, diantaranya : (a) peningkatan pertumbuhan ekonomi; (b) peningkatan daya beli masyarakat; (c) peningkatan daya saing industri dan perluasan bisnis; dan (d) peningkatan ekspor produk.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

2.1. Visi

Visi didasarkan pada visi Indonesia 2045 yaitu mewujudkan Indonesia sebagai negara yang berdaulat, adil dan makmur. Visi Presiden 2020-2024 adalah “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong”. Sebagai organisasi yang membantu Presiden untuk urusan kelautan dan perikanan, maka visi KKP 2020-2024 ditetapkan untuk mendukung terwujudnya Visi Presiden.

Visi KKP 2020-2024 adalah “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan” untuk mewujudkan “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong”

Visi BRPBATPP pada tahun 2020-2024 adalah mendukung Visi Pusat Riset Perikanan dan Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP yang berlandaskan pada Visi KKP yaitu “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan” untuk mewujudkan “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong” melalui riset dan inovasi iptek perikanan serta penyelenggaraan penyuluhan.

2.2. Misi

Misi BRPBATPP adalah mendukung misi Pusat Riset Perikanan dan Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP yang berlandaskan pada misi Presiden dan KKP dalam bidang kelautan dan perikanan. Dari 9 (sembilan) misi Presiden, KKP mendukung 4 (empat) misi yaitu :

1. Misi ke-1 yakni Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia melalui Peningkatan Daya Saing SDM KP dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan
2. Misi ke-2 yakni Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing melalui Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional

3. Misi ke-4 yakni Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan melalui Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
4. Misi ke-8 yakni Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP.

Implementasi dari visi dan misi Presiden dilakukan secara bertanggungjawab berlandaskan gotong royong, sehingga saling memperkuat, memberi manfaat dan menghasilkan nilai tambah ekonomi, sosial dan budaya bagi kepentingan bersama.

2.3. Tujuan

Sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada dibawah naungan 2 (dua) Pusat, yaitu Pusat Riset Perikanan dan Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan, maka tujuan yang ingin dicapai selama tahun 2020-2024 harus mampu menjalankan tujuan dari Pusat Riset Perikanan maupun Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP tersebut. Tujuan yang ingin dicapai BRPBATPP selama tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraan pelaku utama dan pelaku usaha serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup melalui penyelenggaraan penyuluhan.
2. Meningkatkan pemanfaatan inovasi teknologi mendukung industrialisasi perikanan budidaya air tawar yang berdaya saing.
3. Menghasilkan dan mengembangkan riset dan inovasi perikanan budidaya air tawar mendukung pembangunan berkelanjutan.
4. Menyelenggarakan fungsi kelembagaan dan manajerial riset dan SDM sesuai tata kelola pemerintahan yang baik lingkup BRPBATPP

Tujuan ke-1 merupakan tujuan dari kegiatan penyuluhan di bawah koordinasi Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP. Tujuan ke-2 dan ke-3 merupakan tujuan dari kegiatan riset yang ada di bawah koordinasi Pusat Riset Perikanan. Untuk tujuan ke-4 merupakan tujuan dari kegiatan riset dan penyuluhan yang berada dibawah koordinasi Pusat Riset Perikanan dan Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP.

Tabel 2.1. Keterkaitan Visi, Misi dan Tujuan dalam Renstra BRPBATPP

VISI	MISI	TUJUAN
“Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan” untuk mewujudkan “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong” melalui riset dan inovasi iptek perikanan serta penyelenggaraan penyuluhan.	Misi 1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia melalui Peningkatan Daya Saing SDM KP dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan	Meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraan pelaku utama dan pelaku usaha serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup melalui penyelenggaraan penyuluhan
	Misi 2. Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing melalui Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional	Meningkatkan pemanfaatan inovasi teknologi mendukung industrialisasi perikanan budidaya air tawar yang berdaya saing
	Misi 4. Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan melalui Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Menghasilkan dan mengembangkan riset dan inovasi perikanan budidaya air tawar mendukung pembangunan berkelanjutan
	Misi 8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP	Menyelenggarakan fungsi kelembagaan dan manajerial riset dan SDM sesuai tata kelola pemerintahan yang baik lingkup BRPBATPP

2.4. Sasaran Kegiatan BRPBATPP 2021-2024

Renstra BRPBATPP tahun 2020-2024 menjelaskan bahwa sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan melalui pelaksanaan program riset dan SDM merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh BRPBATPP dalam mendukung target kinerja sebagai suatu *outcome/impact* dari program yang dilaksanakan. Sasaran Strategis KKP adalah sebagai berikut:

- SS-1 Kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan meningkat
- SS-2 Ekonomi sektor KP meningkat
- SS-3 Sumber daya kelautan dan perikanan berkelanjutan
- SS-4 Kapasitas dan kompetensi SDM KP meningkat

- SS-5 Hasil riset dan inovasi dimanfaatkan
- SS-6 Tatakelola SDKP bertanggung jawab
- SS-7 Industrialisasi KP berdaya saing
- SS-8 Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan Integratif
- SS-9 Tatakelola pemerintahan yang baik

Dengan memperhatikan misi KKP dan tujuan BRSDM KP tahun 2021-2024, maka sasaran program yang akan dicapai BRSDM pada tahun 2021-2024 mengacu pada sasaran strategis KKP adalah sebagai berikut :

- SP1 Pendampingan kelompok pelaku usaha/utama mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat KP
- SP2 Hasil riset WPP mendukung sumber daya kelautan dan perikanan berkelanjutan
- SP3 Kapasitas dan kompetensi SDM KP meningkat
- SP4 Hasil riset dan inovasi dimanfaatkan
- SP5 Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BRSDM

Dengan memperhatikan misi KKP dan tujuan BRSDM KP tahun 2021-2024, maka sasaran kegiatan yang akan dicapai Pusat Riset Perikanan pada tahun 2021-2024 mengacu pada sasaran strategis KKP adalah sebagai berikut :

- SS-1 Hasil riset WPP mendukung sumber daya perikanan berkelanjutan
- SS-2 Hasil riset dan inovasi perikanan yang dimanfaatkan
- SS-3 Tersedianya Data, Informasi dan Rekomendasi Kebijakan Hasil Riset Perikanan
- SS-4 Tersedianya Produk dan Prototipe Hasil Riset Perikanan
- SS-5 Tersedianya Sarana dan Prasarana Riset Perikanan
- SS-6 Tersedianya Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Riset Perikanan
- SS-7 Tata Kelola pemerintahan yang baik pada Pusat Riset Perikanan

Dengan memperhatikan misi KKP dan tujuan BRSDM KP tahun 2021-2024, maka sasaran kegiatan yang akan dicapai Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP pada tahun 2021-2024 mengacu pada sasaran strategis KKP adalah sebagai berikut :

- SK 1 Pendampingan kelompok pelaku usaha/utama dalam mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat KP
- SK 2 Kapasitas dan kompetensi SDM KP meningkat

- SK 3 Aparatur Yang Dididik dan Dilatih
- SK 4 Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelatihan dan Penyuluhan KP Yang Terstandar
- SK 5 Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan
- SK 6 Terselenggaranya Pelatihan SDM Kelautan dan Perikanan
- SK 7 Terselenggaranya Layanan Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan
- SK 8 Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup Pelatihan dan Penyuluhan KP

Selanjutnya BRPBATPP, dengan memperhatikan misi KKP dan tujuan BRSDM KP, tujuan Pusat Riset Perikanan dan tujuan Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP tahun 2021-2024, maka sasaran kegiatan yang akan dicapai BRPBATPP pada tahun 2021-2024 mengacu pada sasaran strategis KKP, sasaran program BRSDM KP, sasaran kegiatan Pusat Riset Perikanan dan Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP adalah sebagai berikut :

- S.01 Pendampingan kelompok pelaku usaha/utama dalam mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat KP
- S.02 Hasil riset dan inovasi BRPBATPP yang dimanfaatkan
- S.03 Tersedianya Data, Informasi dan Rekomendasi Kebijakan Hasil Riset BRPBATPP
- S.04 Tersedianya Produk dan Prototipe Hasil Riset BRPBATPP
- S.05 Tersedianya Sarana dan Prasarana Riset BRPBATPP
- S.06 Tersedianya Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Riset BRPBATPP
- S.07 Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan
- S.08 Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup BRPBATPP

Dalam penyusunannya, BRPBATPP menggunakan 3 (tiga) perspektif, yaitu *stakeholder perspective*, *internal process perspective*, dan *learning and growth perspective* sebagai berikut :

Stakeholders Perspective

Sasaran strategis pertama (SS-1) yang akan dicapai di level 0 KKP adalah “Kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan meningkat”, dengan Indikator Kinerja Indeks Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan dari 59,16 pada tahun 2020 menjadi 63,87 pada tahun 2024. Sasaran strategis ini diturunkan ke BRSDM menjadi “Pendampingan kelompok pelaku usaha/utama mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat KP” dengan IKU

pembentuk yaitu “Kelompok kelautan dan perikanan yang ditingkatkan kelasnya”, setiap tahun sebanyak 1.500 kelompok selama tahun 2021-2024 dan IKU “Kelompok kelautan dan perikanan yang dibentuk” dengan target 2.000 setiap tahun selama 2021-2024.

Kedua IKU tersebut selanjutnya diturunkan menjadi Indikator kinerja Puslatluh kelompok pelaku utama/usaha yang dinilai kelas kelompoknya, dengan target tahun 2020 sebanyak 1.735 kelompok, akan tetapi mulai tahun 2021 terjadi perubahan Nomenklatur IKU dengan mengadopsi langsung IKU BRSDM yaitu “kelompok pelaku utama/usaha yang meningkat kelasnya” dengan target 1.500 setiap tahunnya sampai dengan tahun 2024. IKU calon kelompok pelaku utama/usaha yang akan dibentuk menjadi kelompok dengan target 2.100 pada tahun 2020, dan mengalami perubahan nomenklatur IKU pada tahun 2021 dengan mengadopsi langsung IKU BRSDM “Kelompok kelautan dan perikanan yang dibentuk” dengan target 2.000 setiap tahun selama 2021-2024.

Selanjutnya Sasaran strategis ini diturunkan ke BRPBATPP menjadi Sasaran 1 (S-1) “Pendampingan kelompok pelaku usaha/utama dalam mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat KP” dengan indikator kinerja pembentuk yaitu:

- IKS.01.1 “Kelompok kelautan dan perikanan yang ditingkatkan kelasnya di Satminkal BRPBATPP” dengan target 75 kelompok setiap tahunnya selama tahun 2021-2024.
- IKS.01.2 “Kelompok kelautan dan perikanan yang dibentuk di Satminkal BRPBATPP” dengan target 150 kelompok setiap tahunnya selama tahun 2021-2024.

Internal Process Perspective

Sasaran 2 (S-2) yang akan dicapai oleh BRPBATPP adalah “Hasil riset dan inovasi BRPBATPP yang dimanfaatkan”, dengan indikator kinerja pembentuk yaitu :

- IKS.02.1 “Hasil riset BRPBATPP yang dimanfaatkan oleh sektor industri” dengan target 1 paket pada tahun 2021

Sasaran 3 (S-3) yang akan dicapai adalah “Tersedianya Data, Informasi dan Rekomendasi Kebijakan Hasil Riset BRPBATPP”, dengan indikator kinerja pembentuk yaitu :

- IKS.03.1 Data dan/atau informasi hasil riset BRPBATPP dengan target 1 paket setiap tahunnya selama tahun 2021-2024

IKS.03.2 Karya Tulis Ilmiah BRPBATPP yang dipublikasikan dengan target 30 dokumen setiap tahunnya selama tahun 2021-2024

Sasaran 4 (S-4) yang akan dicapai adalah “Tersedianya Produk dan Prototipe Hasil Riset BRPBATPP”, dengan indikator kinerja pembentuk yaitu :

IKS.04.1 “Teknologi hasil riset BRPBATPP” dengan target 5 paket setiap tahunnya selama tahun 2021-2024

IKS.04.2 “Produk biologi hasil riset BRPBATPP” dengan target 2 paket setiap tahunnya selama tahun 2021-2024

Sasaran 5 (S-5) yang akan dicapai adalah “Tersedianya Sarana dan Prasarana Riset BRPBATPP”, dengan indikator kinerja pembentuk yaitu :

IKS.05.1 “Sarana dan Prasarana BRPBATPP yang ditingkatkan kapasitasnya” dengan target 2 paket pada tahun 2021 dan 1 paket setiap tahunnya selama tahun 2022-2024

Sasaran 6 (S-6) yang akan dicapai adalah “Tersedianya Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Riset BRPBATPP”, dengan indikator kinerja pembentuk yaitu :

IKS.06.1 “Sertifikasi kelembagaan BRPBATPP yang terstandar” dengan target 1 lembaga setiap tahunnya selama tahun 2021-2024

Sasaran 7 (S-7) yang akan dicapai adalah “Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan”, dengan indikator kinerja pembentuk yaitu :

IKS.07.1 “Jumlah Kelompok Pelaku utama/ Pelaku Usaha yang disuluh di BRPBATPP” dengan target 3.464 kelompok pada tahun 2021 dan meningkat menjadi 4.687 kelompok pada tahun 2024

IKS.07.2 “Jumlah Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang diterapkan di BRPBATPP” dengan target 1 produk pada tahun 2021, dan meningkat menjadi 5 produk pada tahun 2024

Learning and Growth Perspective (input)

Untuk melaksanakan pencapaian sasaran strategis sebagaimana tersebut di atas, dibutuhkan input yang dapat mendukung terlaksananya proses untuk menghasilkan *output* dan *outcome* BRPBATPP melalui Sasaran 8 (S-8) “Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup BRPBATPP” dengan indikator kinerja pembentuk yaitu :

- IKS.08.1 Jejaring dan/atau kerjasama BRPBATPP yang disepakati dan / atau ditindaklanjuti dengan target 3 dokumen setiap tahunnya selama tahun 2021-2024
- IKS.08.2 Indeks Profesionalitas ASN BRPBATPP dengan target 73 pada tahun 2021 menjadi 76 pada tahun 2024
- IKS.08.3 Persentase unit kerja BRPBATPP yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar dengan target sebesar 84% setiap tahunnya selama tahun 2021-2024
- IKS.08.4 Nilai IKPA BRPBATPP dengan target nilai sebesar minimal 89 setiap tahunnya selama tahun 2021-2024
- IKS.08.5 Presentase Penyelesaian Temuan LHP BPK BRPBATPP dengan target sebesar 100% setiap tahunnya selama tahun 2021-2024
- IKS.08.6 Nilai Kinerja Anggaran BRPBATPP dengan target nilai sebesar minimal 86 setiap tahunnya selama tahun 2021-2024
- IKS.08.7 Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal Riset Perikanan BRPBATPP dengan target sebesar 100% setiap tahunnya selama tahun 2021-2024
- IKS.08.8 Persentase layanan dukungan manajemen internal Penyuluhan Kelautan dan Perikanan BRPBATPP dengan target sebesar 100% setiap tahunnya selama tahun 2021-2024
- IKS.08.9 Nilai Rekonsiliasi Kinerja BRPBATPP dengan target nilai sebesar 80 setiap tahunnya selama tahun 2021-2024

Pada periode 2021-2024, terdapat 3 (tiga) Program yang dilaksanakan oleh BRPBATPP sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya yaitu:

1. Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi, termasuk didalamnya Penyuluhan Perikanan;
2. Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
3. Program Dukungan Manajemen, bersifat pelayanan internal untuk mendukung pelayanan aparatur dan/atau administrasi pemerintahan (pelayanan internal) pada BRPBATPP.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

UU Nomor 31 Tahun 2004 Nomor 45 tahun 2009 pasal 6 ayat (1) menyebutkan bahwa “pengelolaan perikanan bertujuan agar tercapainya manfaat secara optimal dan berkelanjutan serta terjaminnya kelestarian sumber daya ikan”. Pencapaian tujuan pembangunan itu dilaksanakan dalam jangka panjang, jangka menengah, maupun tahunan dengan terencana. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dijadikan pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) serta Rencana Kerja Tahunan (RKT).

Fokus RPJMN periode IV (2020-2024) dalam siklus RPJPN 2005-2025 adalah untuk menciptakan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang. Pembangunan tersebut diprioritaskan untuk memperkuat struktur perekonomian berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia berkualitas serta berdaya saing.

Sejak awal 2020 hingga triwulan pertama tahun 2021, hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia, telah terjangkit pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Pandemi COVID-19 telah menimbulkan disrupsi pada kehidupan manusia, menyebabkan terjadinya penurunan aktivitas ekonomi di seluruh negara dan berakibat resesi di dunia. Dampak yang dirasakan Indonesia juga cukup besar dengan terganggunya mata rantai pasokan barang dan jasa, terganggunya mobilitas masyarakat, dan menurunnya kegiatan ekonomi khususnya pada sektor industri dan pariwisata yang berdampak pada meningkatnya angka-angka pengangguran dan kemiskinan serta pada akhirnya menimbulkan penurunan pertumbuhan ekonomi nasional termasuk didalamnya sektor kelautan dan perikanan. Keadaan ini memerlukan pengendalian yang lebih komprehensif dan perlu adanya orientasi baru dalam perencanaan pembangunan pada tahun 2021, yang ditekankan pada pemulihan kehidupan masyarakat dan roda perekonomian untuk dapat kembali

berjalan lancar, sesuai dengan tema RKP pada tahun 2021 adalah “Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial”.

RPJMN 2020-2024 telah mengarusutamakan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Target-target dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) beserta indikatornya telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam 7 agenda pembangunan Indonesia sebagai berikut:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.
2. Agenda mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
3. Agenda meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
4. Agenda membangun revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.
5. Agenda memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.
6. Agenda membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.
7. Agenda memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Dalam rangka melaksanakan agenda Pembangunan Nasional (Prioritas Nasional) RPJMN 2020-2024, telah disusun Proyek Prioritas Strategis (Major Project) yang merupakan proyek yang memiliki nilai strategis dan daya ungkit tinggi untuk mencapai untuk mencapai sasaran prioritas pembangunan. Major Project di KKP yaitu Revitalisasi Tambak di Kawasan Sentra Produksi Udang dan Bandeng, dan Integrasi Pelabuhan Perikanan dan Fish Market Bertaraf Internasional. Selain itu KKP juga mendukung mayor project lainnya antara lain terkait dengan pariwisata dan Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan.

Pelaksanaan Agenda Pembangunan Nasional (Prioritas Nasional) dilakukan bersinergi antara KKP dengan Kementerian/Lembaga dan instansi lain yang terkait serta dengan Pemerintah Daerah dan Badan Usaha (BUMN/Swasta). Strategi Agenda Pembangunan Nasional yang terkait dengan tugas KKP antara lain adalah:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan, yang meliputi Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan, memperkuat komitmen pelaksanaan target SDG 14 Ekosistem Lautan (Life Below Water),

dan Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi.

2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, dengan strategi penguatan basis produksi dan pengolahan komoditas unggulan daerah yang tersebar pada sentra-sentra hilirisasi pertanian dan perikanan di Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN), kawasan transmigrasi, Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT)/Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP);
3. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim, dengan strategi konservasi kawasan dan perlindungan keanekaragaman hayati di daratan maupun pesisir, perlindungan kerentanan pesisir dan sektor kelautan, dan pengembangan rendah karbon pesisir dan laut.

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kelautan dan Perikanan

Arah dan kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan adalah sebagai berikut :

1. Memperbaiki komunikasi dengan nelayan, evaluasi kebijakan, penyederhanaan izin, pengembangan pelabuhan, penangkapan ikan sampai dengan ZEE dan laut lepas, peningkatan pendapatan melalui akses permodalan, perlindungan dan perbaikan hidup nelayan. Arah kebijakan ini menjabarkan misi KKP yang terkait dengan Peningkatan Kontribusi Ekonomi sektor KP (DJPT)
2. Monev dan memperkuat perikanan budidaya untuk penyerapan lapangan kerja, peningkatan protein dan nilai tambah melalui akses permodalan, dan perlindungan usaha budidaya. Arah kebijakan menjabarkan misi KKP yang terkait dengan Peningkatan kontribusi ekonomi sektor KP (DJPB)
3. Membangkitkan industri kelautan dan perikanan melalui pemenuhan kebutuhan bahan baku industri, peningkatan kualitas mutu produk, penguatan sistem karantina ikan, peningkatan nilai tambah untuk peningkatan devisa. Arah kebijakan menjabarkan misi KKP yang terkait dengan Peningkatan kontribusi ekonomi sektor KP. (DJPDS, BKIPM).
4. Pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau – pulau kecil serta penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui koordinasi dengan instansi terkait Arah kebijakan

menjabarkan misi KKP yang terkait dengan Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

5. Penguatan SDM dan inovasi riset kelautan dan perikanan. Arah kebijakan menjabarkan misi KKP yang terkait dengan Peningkatan Daya Saing SDM KP dan Inovasi Riset.

Untuk mencapai 5 (lima) arah kebijakan diatas, KKP melaksanakan kebijakan tatakelola pemerintahan yang baik yang dilakukan oleh seluruh unit kerja di pusat dan daerah. Hal ini menjabarkan misi KKP terkait dengan peningkatan tata kelola pemerintahan.

Strategi pelaksanaan arah kebijakan diatas adalah:

1. Memperbaiki komunikasi dengan nelayan, evaluasi kebijakan, penyederhanaan izin, pengembangan pelabuhan, penangkapan ikan sampai dengan ZEE dan laut lepas, peningkatan pendapatan melalui akses permodalan, perlindungan dan perbaikan hidup nelayan. Strategi yang akan dilaksanakan adalah:
 - a. Membuka komunikasi dengan *stakeholder* untuk harmonisasi kebijakan berbasis data, informasi dan pengetahuan yang faktual;
 - b. Perbaikan, penataan, dan penyederhanaan perizinan usaha di pusat dan daerah, termasuk sinergi dengan instansi lain yang terkait
 - c. Pengembangan pelabuhan perikanan prioritas di daerah, pelabuhan perikanan berwawasan lingkungan, dan pelabuhan perikanan yang terintegrasi dengan pasar ikan bertaraf internasional (*Major Project* RPJMN) dengan berkoordinasi dengan K/L terkait, pemerintah daerah dan badan usaha.
 - d. Eksplorasi perikanan di ZEE dan laut lepas.
 - e. Fasilitasi dan pengembangan skema pembiayaan yang murah dan mudah diakses, optimalisasi peran LPMUKP.
 - f. Peningkatan kesejahteraan, pemberdayaan nelayan, pemberdayaan kelompok nelayan perempuan, perlindungan usaha kelautan dan perikanan skala kecil, penguatan kelembagaan nelayan.
 - g. Penguatan kelompok usaha bersama melalui pembentukan korporasi nelayan (*Major Project* RPJMN) berkoordinasi dengan kementerian Koperasi dan UKM dan pemerintah daerah.
 - h. Pengembangan lembaga pengelola WPP dan penguatan data stok sumberdaya ikan.
 - i. Pengelolaan perikanan di Perairan Umum Daratan (PUD).

- j. Pengembangan armada perikanan, alat penangkap ikan dan alat bantu penangkap ikan yang ramah lingkungan.
 - k. Partisipasi dalam organisasi pengelolaan perikanan regional yang melingkupi perairan Indonesia (RFMOs).
 - l. Pengembangan kampung nelayan maju, bantuan premi asuransi nelayan, perluasan skema asuransi mandiri, Sertifikasi tanah nelayan.
 - m. Pengaturan akses nelayan terhadap pengelolaan sumberdaya, kemudahan fasilitasi usaha dan investasi, dan pengembangan perikanan berbasis digital.
 - n. Pengembangan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT).
 - o. Penguatan Unit Pelaksana Teknis perikanan tangkap.
2. Perikanan budidaya dioptimalkan dan diperkuat untuk penyerapan lapangan kerja, peningkatan protein dan nilai tambah melalui akses permodalan, dan perlindungan usaha budidaya. Strategi yang akan dilaksanakan adalah:
- a. Akselerasi produk perikanan budidaya, ekstensifikasi lahan budidaya;
 - b. Pembangunan/revitalisasi tambak udang dan bandeng (*Major Project* RPJMN) berkoordinasi dengan K/L terkait, pemerintah daerah dan badan usaha;
 - c. Pengembangan perikanan budidaya air laut, payau dan tawar;
 - d. Pengembangan budidaya ikan hias, rumput laut, lobster;
 - e. Pengembangan pakan mandiri, pakan dari maggot;
 - f. Pembangunan fasilitas perbenihan, produksi induk unggul dan benih bermutu;
 - g. Pengelolaan kluster kawasan budidaya berkelanjutan;
 - h. Pengembangan kesehatan lingkungan budidaya dan pengujian residu produk perikanan budidaya untuk sertifikasi untuk ekspor;
 - i. Pelaksanaan sertifikasi cara budidaya Ikan yang Baik (CBIB), cara perbenihan ikan yang baik (CPIB), dan cara pembuatan pakan ikan yang baik (CPPIB);
 - j. Pembangunan dan penguatan sarana dan prasarana perikanan budidaya antara lain Balai Benih Ikan, unit perbenihan, dan Broodstock center;
 - k. Pembangunan dan penguatan infrastruktur perikanan budidaya antara lain meliputi tambak, kolam, saluran irigasi tambak, keramba jaring apung dan lain-lain;
 - l. Sertifikasi lahan dan asuransi usaha perikanan budidaya;

- m. Penataan perizinan usaha budidaya pusat dan daerah, fasilitasi usaha dan investasi, dan sinergi perizinan dengan instansi terkait;
 - n. Pengembangan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT); dan
 - o. Penguatan UPT perikanan budidaya.
3. Membangkitkan industri kelautan dan perikanan melalui pemenuhan kebutuhan bahan baku industri, peningkatan kualitas mutu produk, penguatan sistem karantina ikan, peningkatan nilai tambah untuk peningkatan devisa. Strategi yang akan dilaksanakan adalah:
- a. Perbaikan kualitas, kapasitas, dan produktifitas industri pengolahan;
 - b. Meningkatkan produksi, produktifitas, standardisasi, jaminan mutu dan keamanan produk kelautan dan perikanan;
 - c. Penataan rantai pasok hasil perikanan dalam koridor logistik, penguatan sistem logistik ikan yang efisien, pemetaan dan pemantauan logistik hasil perikanan, Pemetaan logistik hasil Perikanan di daerah;
 - d. Pembinaan pelaku usaha perikanan dalam rangka pengadaan dan penyimpanan hasil perikanan, penguatan daya saing Unit Pengolah Ikan (UPI);
 - e. Pembinaan pelaku usaha perikanan dan penyedia layanan jasa logistik dalam rangka distribusi dan transportasi hasil perikanan;
 - f. Peningkatan sarana prasarana pengadaan dan penyimpanan ikan;
 - g. Pelaksanaan Kampanye Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan untuk peningkatan konsumsi ikan masyarakat dalam rangka mengatasi stunting;
 - h. Perluasan akses pasar dalam dan luar negeri, pengembangan sistem pemasaran produk berbasis digital, peningkatan promosi produk kelautan dan perikanan untuk skala internasional, penguatan branding produk perikanan kelautan Indonesia, pemetaan dan strategi akses pasar negara tujuan ekspor;
 - i. Pembinaan dan Pengelolaan Pasar Ikan, Pembangunan fasilitas pemasaran perikanan skala internasional (Mayor Project) K/L terkait, pemerintah daerah dan badan usaha;
 - j. Pemetaan preferensi, konsumsi dan kebutuhan ikan konsumen dalam negeri;
 - k. Peningkatan Partisipasi daerah dalam mendukung pemasaran produk kelautan dan perikanan;

- l. Penyusunan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) produk hasil KP, sertifikasi kelayakan pengolahan (SKP), sertifikasi SNI produk kelautan dan perikanan;
 - m. Peningkatan unit penanganan dan unit pengolahan produk hasil KP;
 - n. Pemenuhan kebutuhan bahan baku serta peningkatan nilai tambah UPI menuju *zero waste*;
 - o. Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana sistem rantai dingin dan peralatan pengolahan;
 - p. Peningkatan ragam baru produk hasil kelautan dan perikanan, hilirisasi industri rumput laut dan sumber daya alam laut bernilai tambah;
 - q. Fasilitasi kemudahan pelaku usaha dan investasi, pembiayaan, teknologi dan pasar dan didukung regulasi yang kondusif;
 - r. Pelaksanaan uji terap produk inovasi teknologi pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan
 - s. Harmonisasi sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan serta penanganan kasus mutu ekspor impor produk perikanan, penerapan standardisasi mutu, sertifikasi dan ketelusuran produk (*traceability*), peningkatan sarana dan prasarana pengujian mutu;
 - t. Pengembangan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT);
 - u. Penguatan UPT mutu hasil perikanan dan karantina ikan.
4. Pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil serta penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui koordinasi dengan instansi terkait. Strategi yang akan dilaksanakan adalah:
- a. Pengelolaan ekosistem kelautan dan pemanfaatan jasa kelautan secara berkelanjutan termasuk penanganan pencemaran laut dan sampah plastik;
 - b. Peningkatan manajemen dan pemanfaatan kawasan konservasi perairan secara berkelanjutan
 - c. Peningkatan pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan
 - d. Peningkatan pengelolaan pulau-pulau kecil/terluar
 - e. Peningkatan produksi dan usaha garam nasional, ekstensifikasi dan intensifikasi lahan garam, peningkatan kualitas garam
 - f. Pembangunan sarana prasarana di kawasan wisata bahari
 - g. Peningkatan jasa kelautan yang dikelola untuk pengembangan ekonomi

- h. Penguatan kelembagaan, masyarakat hukum adat, tradisional dan lokal di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang diakui.
 - i. Pengelolaan Biofarmakologi dan peningkatan pemanfaatan marine bioproduct dan bioteknologi, pengembangan rendah karbon pesisir dan laut.
 - j. Fasilitasi perizinan pengelolaan perairan
 - k. Pengelolaan dan penataan ruang laut dan rencana zonasi pesisir, Penyusunan RZ kawasan, KSN, KSNT yang ditetapkan oleh Peraturan Perundangan dan Rencana Aksi pengelolaan ruang laut
 - l. Penyelesaian rencana zonasi laut, pengendalian pemanfaatan ruang laut dan pulau-pulau kecil, termasuk penyelarasan RZWP3K dan RTRW Provinsi;
 - m. Pemberantasan IUU Fishing dan *destructive fishing*;
 - n. Operasi armada pengasawan SDKP, operasional kapal pengawas, speed boat/RIB/rubber boat pengawas, operasi pencegahan (*intercept*) secara terintegrasi, kerjasama operasi pengawasan di laut;
 - o. Pengendalian dan pengawasan SDKP yang profesional dan partisipatif
 - p. Penegakan hukum di bidang kelautan dan perikanan, penguatan Satgas pemberantasan *Illegal Fishing*.
 - q. Pengawasan terhadap pelaku usaha kelautan dan perikanan yang diperiksa kepatuhannya
 - r. Penyadartahuan masyarakat KP dalam pemanfaatan sumber daya perikanan yang tertib dan bertanggungjawab
 - s. Operasional Pengawasan ekspor, impor dan domestik
 - t. Harmonisasi Sistem Perkarantina dan Keamanan Hayati Ikan dalam dan luar Negeri, sinergi pengawasn lalu lintas ikan, pelayanan tindak karantina di *entry* dan *exit point* serta pos lintas batas (*gateway*) wilayah perbatasan
 - u. Peningkatan sarana dan prasarana pengawasan dan karantina ikan
 - v. Pengembangan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT)
 - w. Peningkatan UPT Pengelolaan Ruang Laut, Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan dan Karantina Ikan.
5. Penguatan SDM dan inovasi riset kelautan dan perikanan. Strategi yang akan dilaksanakan adalah:
- a. Penguatan kegiatan riset yang dimanfaatkan oleh masyarakat, inovasi teknologi dan riset kemaritiman, kelautan dan perikanan, serta peningkatan *database* kelautan dan perikanan;

- b. Peningkatan kualitas riset mendukung program utama KKP
- c. Penerapan Teknologi Adaptif Lokasi (TAL) Hasil Riset, diseminasi teknologi perikanan dan kelautan yang berkelanjutan dan produktif;
- d. Pengembangan/pembentukan pusat unggulan riset kelautan dan perikanan;
- e. Pengembangan, pendidikan, pelatihan dan penyuluhan, termasuk yang berbasis digital;
- f. Pengembangan kewirausahaan perikanan, pengembangan angkatan kerja perikanan generasi milenial, peningkatan daya saing SDM kelautan dan perikanan melalui diklat agar dapat terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri serta membentuk *startup* (usaha rintisan), penguatan literasi maritim;
- g. Pelatihan masyarakat kelautan dan perikanan yang bersertifikasi kompetensi;
- h. Pembentukan kelompok kelautan dan perikanan mandiri;
- i. Penguatan pendidikan vokasi kelautan dan perikanan;
- j. Peningkatan sarana dan prasarana riset, pendidikan, pelatihan dan penyuluhan kelautan dan perikanan;
- k. Peningkatan UPT riset, pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan kelautan dan perikanan.

Arah Kebijakan Pengarusutamaan pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2020-2024 adalah:

- 1. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
- 2. Gender;
- 3. Modal Sosial Budaya;
- 4. Transformasi Digital.

Pengarusutamaan dalam Renstra 2020-2024 KKP mengacu pada Dokumen RPJMN 2020-2024 yang telah menetapkan 4 (empat) pengarusutamaan (mainstreaming) sebagai bentuk pembangunan inovatif adaptif, sehingga dapat menjadi katalis pembangunan untuk menuju masyarakat sejahtera dan berkeadilan. Keempat mainstreaming ini akan mewarnai dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pembangunan sektor dan wilayah, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan memastikan pelaksanaannya secara inklusif. Selain mempercepat pencapaian target-target dari fokus pembangunan, pengarusutamaan ini juga bertujuan untuk memberikan akses pembangunan yang merata dan

adil dengan meningkatkan efisiensi tata kelola dan juga adaptabilitas terhadap faktor eksternal lingkungan.

a. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

TPB/SDGs mencakup 17 Tujuan/Goal, 169 target, dan 241 indikator. Dalam melaksanakan TPB/SDGs, diperlukan keterkaitan antardimensi pembangunan yang saling berpengaruh. Dimensi pembangunan yang dimaksud meliputi dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan. KKP akan memperkuat komitmen pelaksanaan target TPB 14 Ekosistem Lautan (Life Below Water yang mencakup diantaranya (1) mengurangi pencemaran laut termasuk sampah laut, (2) mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan, (3) meminimalisasi dan mengatasi dampak pengasaman laut, (4) mengatur kuota penangkapan per wilayah agar sumber daya ikan tetap berkelanjutan, (5) melestarikan wilayah pesisir dan laut, (6) mengatur subsidi perikanan agar tidak berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebih, (7) meningkatkan manfaat ekonomi atas pemanfaatan berkelanjutan sumber daya laut termasuk melalui pengelolaan perikanan, budidaya air dan pariwisata berkelanjutan, (8) meningkatkan pengetahuan ilmiah, mengembangkan kapasitas penelitian dan alih teknologi kelautan, (9) menyediakan akses untuk nelayan skala kecil terhadap sumber daya laut dan pesisir, dan (10) meningkatkan pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan lautan dan sumber dayanya dengan menetapkan hukum internasional yang tercermin dalam the United Nation Convention on the Law of the Sea (UNCLOS).

b. Gender

Pengarusutamaan gender diarahkan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di berbagai sektor dalam pembangunan, dengan strategi meningkatkan peran, akses, kontrol dan manfaat gender dalam pembangunan kelautan dan perikanan. Strategi yang akan dilakukan adalah percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender di semua bidang pembangunan di tingkat pusat, dan daerah, yang mencakup: (a) Penguatan 7 prasyarat PUG: komitmen, kebijakan, kelembagaan, sumber daya, data terpilah, alat analisis, partisipasi masyarakat. (b) Penerapan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG); (c) Penyiapan roadmap PUG; (d) Pengembangan model pelaksanaan PUG terintegrasi antar unit eselon I di KKP dan antar pusat-daerah;

(g) Pembuatan profil gender; (h) Monitoring dan evaluasi serta pengawasan Pengarusutamaan Gender (PUG) KKP.

c. Modal Sosial Budaya

Pengarusutamaan modal sosial budaya merupakan internalisasi nilai dan pendayagunaan kekayaan budaya untuk mendukung seluruh proses pembangunan. Pengetahuan tradisional (local knowledge), kearifan local (local wisdom), pranata sosial di masyarakat sebagai penjelmaan nilai-nilai sosial budaya komunitas harus menjadi pertimbangan dalam proses perencanaan serta penyusunan kebijakan dan program pembangunan nasional. Pengarusutamaan sosial-budaya ini bertujuan dan berorientasi pada penghargaan atas khazanah budaya masyarakat, sekaligus upaya pelestarian dan pemajuan kebudayaan bangsa.

Pembangunan kebudayaan ingin memastikan bahwa setiap penduduk memperoleh perlindungan hak kebudayaan dan kebebasan berekspresi untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif. Peningkatan pembangunan inklusif dan berwawasan budaya lingkup KKP, diantaranya adalah (1) Pelaksanaan pembangunan yang mengindahkan nilai budaya, kearifan lokal dan keragaman SDA hayati, (2) Pengembangan dan penguatan budaya bahari dan literasi bahari, dan (3) Pemberdayaan masyarakat adat pesisir dan pulau-pulau kecil.

d. Transformasi Digital

Pengarusutamaan transformasi digital merupakan upaya untuk mengoptimalkan peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa dan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Strategi pengarusutamaan transformasi digital terdiri dari aspek pemantapan ekosistem (supply), pemanfaatan (demand) dan pengelolaan big data.

Penyiapan layanan digital terintegrasi lingkup KKP yang mencakup penyiapan regulasi, penguatan kelembagaan, pembangunan jaringan, sarpras, meningkatkan kapasitas SDM dengan keahlian digital, melakukan kerja sama untuk menyediakan layanan digital dan one data serta penataan sistem perizinan berbasis web (on-line), termasuk penerapan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) KKP dan peningkatan usaha kelautan dan perikanan melalui e-commerce.

3.3 Arah Kebijakan Riset Perikanan

Arah kebijakan BRSDM KP 2020-2024 mengacu pada arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan nasional (RPJMN) dan arah kebijakan pembangunan KP yang ada. Riset perikanan periode 2020-2024 diarahkan untuk menghasilkan inovasi riset dan teknologi yang mendukung pembangunan kelautan dan perikanan berkelanjutan.

Sepuluh fokus kegiatan riset kelautan dan perikanan yang dilaksanakan di BRSDMKP adalah: 1) *Sustainable fisheries*; 2) Konservasi dan mitigasi serta rehabilitasi; 3) *Sustainable aquaculture*; 4) Inovasi teknologi; 5) Perubahan iklim; 6) *Poverty reduction* dan pemberdayaan masyarakat; 7) Jasa kelautan; 8) Pengembangan usaha, sistem bisnis dan trading; 9) Kemandirian pangan dan bahan baku industri; dan 10) Kajian kewilayahan dan geopolitik.

Upaya yang menjadi mandat bagi BRPBATPP untuk memenuhi hal tersebut diantaranya adalah:

1. Menyelenggarakan riset untuk menyelesaikan isu dan permasalahan.
2. Meningkatkan peran riset serta inovasi teknologi dalam mendukung percepatan pembangunan kelautan dan perikanan.
3. Meningkatkan diseminasi hasil riset sesuai dengan upaya pengembangan industri kelautan dan perikanan.
4. Membangun hubungan melalui jaringan kemitraan dalam kerangka kerjasama riset dan industri.
5. Memperkuat kelembagaan dan manajerial riset dan SDM.

Klasifikasi riset mengacu ketentuan LIPI dikategorikan ke dalam riset dasar, riset terapan dan riset pengembangan eksperimental. Riset dasar adalah kegiatan riset yang bersifat eksploratif dan atau eksperimental untuk memperoleh ilmu pengetahuan baru sebagai acuan bagi riset terapan perikanan. Riset terapan merupakan kegiatan riset yang memanfaatkan hasil riset dasar perikanan, dan diarahkan untuk tujuan praktis guna memperoleh pengetahuan dan teknologi dibidang perikanan. Pengembangan eksperimental merupakan kegiatan sistematis dengan menggunakan pengetahuan yang sudah ada yang diperoleh melalui riset dasar perikanan dan atau riset terapan perikanan, untuk memperoleh sistem teknologi yang lebih efektif dan efisien serta menghasilkan produk unggulan di bidang perikanan.

Riset bidang kelautan, perikanan, pengolahan produk dan bioteknologi KP disusun sesuai dengan tingkat kesiapan teknologinya

(TKT). Untuk meningkatkan manfaat dan daya dukung hasil riset yang telah dilakukan, diperlukan pengembangan melalui peningkatan skala (*scaling up*) sebagai bagian dari uji adaptasi. Selanjutnya uji lapang bersama masyarakat diharapkan dapat memudahkan proses diseminasi dan asimilasi hasil inovasi kepada calon pengguna (stakeholder). Dari kegiatan riset dan pengembangan tersebut akan dihasilkan keluaran berupa data dan informasi, teknologi, dan rekomendasi, serta publikasi ilmiah.

Kegiatan hilirisasi lebih diarahkan untuk mengoptimalkan penyebaran hasil riset dan inovasi teknologi dalam memenuhi kebutuhan informasi penelitian, pengembangan, pengkajian, pendidikan, pelatihan, penyuluhan dan penerapan (litbangkajidilatluhtrap) melalui: 1) pengembangan jejaring informasi; 2) pengembangan sumberdaya informasi; 3) adaptasi teknologi informasi sesuai perkembangan dan tuntutan pengguna; dan 4) pengelolaan dan penyebarluasan informasi dengan berbagai media.

3.4 Arah Kebijakan Penyuluhan KP

Kebijakan yang dilaksanakan Pusat Pelatihan dan Penyuluhan dalam mendukung peran BRSDM dalam pembangunan kelautan dan perikanan yang menjadi mandat bagi BRPBATPP adalah dibidang penyuluhan KP.

Kegiatan penyuluhan berdasarkan kepada metoda dan materi penyuluhan yang partisipatif dan inovatif dilaksanakan melalui :

- 1) Peningkatan kemandirian melalui penguatan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha kelautan dan perikanan (penumbuhan kelompok, peningkatan kelas kelompok)
- 2) Peningkatan skala usaha pelaku utama dan pelaku usaha kelautan dan perikanan (UMKM dan Koperasi)
- 3) Peningkatan akses informasi dan teknologi, akses pasar, dan akses permodalan
- 4) Peningkatan kolaborasi Penyuluhan dengan Pendidikan, Pelatihan dan Riset dalam sinergi pendidikan, pemanfaatan hasil kajiwidya, dan diseminasi hasil riset terekomendasi kepada masyarakat pelaku utama dan pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan.

Penataan kembali sistem penyelenggaraan penyuluhan, terutama pasca terbitnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah, dimana kewenangan penyelenggaraan penyuluhan menjadi kewenangan pusat, dalam hal ini Kementerian Kelautan dan

Perikanan. Penyuluhan kelautan dan perikanan dilaksanakan dengan fokus kepada ketenagaan, kelembagaan, penyelenggaraan penyuluhan, pembinaan dan pengawasan, pembiayaan dan sarana prasarana penyuluhan.

Kegiatan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan dibagi dalam 4 (empat) kelompok kegiatan, meliputi:

- a. Pengembangan dan Penataan Kelembagaan dan Ketenagaan;
 - Peningkatan kelas kelompok mandiri
 - Percontohan dan pengembangan kelembagaan penyuluhan pusat di daerah
 - Penempatan dan penyebaran penyuluh di sekretariat penyuluhan di kab/kota
 - Membuat piramida model penyuluh (PNS, PPB dan Penyuluh Swadaya)
- b. Peningkatan Kapasitas Penyuluh;
 - Peningkatan daya saing penyuluh PNS
 - Pengembangan dan pembinaan penyuluh perikanan bantu (PPB)
 - Pembinaan Penyuluh Perikanan swadaya
- c. Pengembangan Penyelenggaraan Penyuluhan berbasis digital;
 - Pengembangan materi *cyber extention*
 - Peningkatan kualitas dan kuantitas media penyuluhan berbasis inovasi dan teknologi
 - Pengembangan penyuluhan wilayah potensi perikanan (mapping)
 - Membangun Sistem Penyuluhan Digital, yang memuat sistem absensi, sistem pelaporan kinerja, dan sistem konsultasi/pendampingan
 - Membangun sistem penilaian kinerja penyuluh PNS, P3K & Swadaya berbasis lokasi (gps)
 - Membangun standar *digital library*, dengan memuat modul-modul yang lengkap sehingga penyuluhan dapat menjadi *Pool knowledge*
- d. Pengembangan dan Penataan Sarana dan Prasarana Penyuluhan;
 - Penataan sarana dan prasarana penyuluhan
 - Pengelolaan Balai/Pos/Satker Penyuluhan
 - Pengembangan sarana dan prasarana penyuluhan
- e. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Penyuluhan
 - Pembinaan reorientasi penyuluh berbasis kinerja
 - Peningkatan sistem evaluasi dan monitoring penyuluh
 - Pengembangan sistem pengawasan penyuluhan interkoneksi

Berkaitan dengan agenda peningkatan kompetensi pelaku utama dan pelaku usaha sebagai pilar pembangunan ekonomi berbasis kelautan dan perikanan, disusun **4 (empat) sasaran pokok** dengan prioritas dan arah kebijakan sebagai berikut:

- 1) **Sasaran Pertama** Penguatan Kelembagaan Ekonomi Pelaku Utama dan Pelaku Usaha Perikanan. Untuk mencapai sasaran tersebut prioritas pengembangan diletakkan pada: (1) Perencanaan partisipatif; (2) Pelatihan dan pendampingan; (3) Tahap peningkatan skala usaha kelompok menuju UMKM KP unggulan (4) Tahap penumbuhan kelompok usaha mandiri; (5) Tahap pemantapan kelompok; (6) Tahap pengembangan kelompok; dan (7) Kegiatan pendampingan kelompok atau gabungan kelompok pada tahap pra-produksi, produksi, dan diversifikasi produk.
- 2) **Sasaran Kedua** Peningkatan Penguasaan Manajemen Usaha, Teknologi dan penjaminan mutu produksi. Untuk mencapai sasaran tersebut prioritas pengembangan diletakkan pada: (1) Penguasaan kelompok masyarakat mitra terhadap manajemen usaha; (2) Penguasaan masyarakat mitra terhadap teknologi produksi; (3) Peningkatan mutu dan nilai tambah; (4) Segmentasi pasar dan preferensi konsumen; dan (5) Pengawasan mutu produk.
- 3) **Sasaran Ketiga** Pengembangan Permodalan. Untuk mencapai sasaran tersebut prioritas pengembangan diletakkan pada: (1) Mobilisasi dana bersama dalam kelompok; (2) Bimbingan pengelolaan dana bersama; dan (3) Bimbingan pengenalan sumber-sumber permodalan.
- 4) **Sasaran Keempat** Pengenalan dan Perluasan Pasar. Untuk mencapai sasaran tersebut prioritas pengembangan diletakkan pada: (1) Pengenalan kelompok atau gabungan kelompok kepada akses pasar lokal; (2) Pengenalan pada pasar regional maupun internasional; dan (3) Pengenalan kelompok pada diversifikasi produk.

3.5 Arah Kebijakan BRPBATPP

Kebijakan BRPBATPP tahun 2020-2024 ditetapkan dengan memperhatikan pembangunan sektor unggulan dengan prioritas kedaulatan pangan. BRPBATPP dalam melaksanakan kebijakan sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang menjalankan kegiatan Riset Perikanan dan kegiatan Penyuluhan Perikanan harus mengikuti kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pusat Riset Perikanan maupun Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP. Untuk melaksanakan arah

kebijakan tersebut di atas, strategi dan langkah operasional yang akan ditempuh BRPBATPP yang selaras dengan misi KKP yang terkait dengan kesejahteraan yaitu meningkatkan pemberdayaan dan kemandirian dalam menjaga keberlanjutan usaha perikanan, yang dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut :

- 1) Menyelenggarakan riset perikanan budidaya air tawar secara terpadu dengan tata kelola yang baik (*good governance*)
- 2) Menyelenggarakan riset perikanan dengan mengacu 4 dari 10 fokus riset 2020-2024, yaitu : Sustainable Aquaculture; Perubahan Iklim; Kemandirian Pangan dan Bahan Baku Industri; Inovasi Teknologi;
- 3) Melakukan transformasi kegiatan melalui inovasi secara berkelanjutan untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat KP, dengan langkah operasional sebagai berikut : (a). Meningkatkan kemandirian UPT dengan membangun kemitraan/kerjasama; (b). Melakukan pengembangan riset menuju kesiapan teknologi yang teruji di lapangan dan berguna bagi stakeholders.
- 4) Meningkatkan sinergitas lingkup BRSDM KP untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas kegiatan, dengan langkah operasional sebagai berikut : (a). Meningkatkan dukungan IPTEK bagi peningkatan daya saing produk dan produktivitas melalui inovasi, penguasaan penelitian dan penerapan Iptek yang disinergikan dengan kegiatan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan; (b). Meningkatkan peran riset sebagai penyedia teknologi inovatif untuk mendukung Tri Darma Perguruan Tinggi serta menjadi bahan penyusunan modul kurikulum sehingga sejalan kemajuan teknologi, dan pemanfaatan sarpras riset dan peneliti dalam meningkatkan kapasitas peserta didik;
- 5) Sinergitas lintas Eselon I KKP dalam mendukung pencapaian target output dan outcome KKP melalui beberapa program BRSDM, dengan langkah operasional sebagai berikut : (a). Penyampaian teknologi yang direkomendasikan; (b). Data dan informasi Perikanan Budidaya Air Tawar
- 6) Meningkatkan kompetensi SDM riset perikanan yang mampu meningkatkan produksi dan produktivitas budidaya air tawar.
- 7) Peningkatan Kapasitas Pelaku Utama dan Pelaku Usaha Sebagai Pilar Pembangunan Ekonomi Berbasis Komoditas Unggulan Kelautan dan Perikanan.
- 8) Penataan Kebijakan Penyuluhan KP, melalui penyelesaian legislasi: Kebijakan dan Strategi Penyuluhan KP, Mekanisme

Penyelenggaraan Penyuluhan KP, Kelembagaan, Sarpras, Metoda dan Materi, dan Pola Diklat Penyuluh.

- 9) Penguatan kelembagaan penyuluhan KP, meliputi sinergitas dan koordinasi dengan kelembagaan penyuluhan tingkat regional dan pemerintah daerah, serta penguatan kelompok pelaku utama perikanan.
- 10) Pengembangan Metode dan Materi Penyuluhan melalui Pengembangan materi penyuluhan bentuk cetak, CD video, web; Penyuluhan dengan media cetak, tertayang dan terdengar, Pemanfaatan sms gateway, web (*cyber extension*); dan Temu: aplikasi, percontohan, dan lain-lain.

3.6. Dukungan BRPBATPP terhadap Program Terobosan KKP

Dalam rangka menciptakan lapangan kerja, mendorong kesejahteraan masyarakat, dan memberi pemasukan lebih optimal bagi keuangan negara dari sektor kelautan dan perikanan, maka Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada tahun 2021-2024 memiliki 3 (tiga) program terobosan, yaitu :

1. Meningkatkan PNPB dari sumberdaya alam perikanan tangkap dan Kesejahteraan nelayan;
2. Menggerakkan perikanan budidaya untuk meningkatkan ekonomi masyarakat yang didukung riset kelautan dan perikanan untuk keberlangsungan sumberdaya laut dan perikanan darat;
3. Membangun kampung-kampung perikanan budidaya tawar, payau dan laut berbasis kearifan lokal.

Ketiga program terobosan tersebut telah selaras dengan RPJMN 2020- 2024, misi dan arahan Presiden, dan arah 5 (lima) kebijakan KKP yang akan dilaksanakan pada tahun 2021-2024. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BRPBATPP, maka dalam rangka mendukung implementasi program terobosan KKP tersebut BRPBATPP memperkuat penyelarasan program terobosan ke-2 dan ke-3 KKP melalui inisiatif strategis riset perikanan dan penyuluhan sebagai berikut:

1. Program terobosan ke-2 KKP

“Menggerakkan perikanan budidaya untuk meningkatkan ekonomi masyarakat yang didukung riset kelautan dan perikanan untuk keberlangsungan sumberdaya laut dan perikanan darat”.

Inisiatif strategis yang akan dilakukan sebagai berikut:

A. Bidang Riset Perikanan

1. Mengembangkan paket teknologi budidaya (benih/bibit, pakan, lingkungan budidaya, Kesehatan ikan dan lain lain) pada komoditas ekonomi yang berorientasi pada peningkatan produksi dan nilai produksi;
2. Melakukan hilirisasi teknologi iptek budidaya komoditas unggulan budidaya kepada pelaku usaha pada level industri maupun masyarakat;
3. Peningkatan kapasitas riset dan Kerjasama dengan berbagai stakeholder (LN, DN, NGO, Pemda, PT, Asosiasi dan swasta);
4. Melakukan riset terkait daya dukung lingkungan untuk pengembangan komoditas budidaya potensial;
5. Melakukan riset terkait pemetaan potensi lahan budidaya.

B. Bidang Penyuluhan

1. Pendampingan oleh Penyuluh Perikanan kepada kelompok pelaku utama/usaha pada kawasan budidaya KP
2. Peningkatan kemandirian melalui penguatan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha kelautan dan perikanan (penumbuhan kelompok, peningkatan kelas kelompok)
3. Peningkatan skala usaha pelaku utama dan pelaku usaha kelautan dan perikanan (UMKM dan Koperasi)
4. Peningkatan akses informasi dan teknologi, akses pasar, dan akses permodalan

2. Program Terobosan ke-3 KKP

“Membangun kampung-kampung perikanan budidaya tawar, payau dan laut berbasis kearifan lokal”

Inisiatif strategis yang akan dilakukan sebagai berikut:

A. Bidang Riset Perikanan

1. Pengembangan domestikasi ikan endemik (koleksi, karakterisasi-inventarisasi, domestikasi, seleksi/ hibridisasi);
2. Pengembangan paket teknologi budidaya (benih, pakan, lingkungan budidaya, Kesehatan ikan, dan lain-lain) pada komoditas ikan untuk ketahanan pangan dan peningkatan pendapatan masyarakat;
3. Hilirisasi teknologi iptek budidaya komoditas ketahanan pangan untuk model di masyarakat;

4. Memberikan pendampingan dalam upaya revitalisasi UPR dengan memberikan benih unggul sehingga masyarakat bisa mengadopsi teknologi budidaya yang dikembangkan untuk memperoleh benih unggul;
5. Pengembangan inovasi budidaya perikanan yang menghasilkan paket teknologi (benih, pakan, lingkungan budidaya, Kesehatan ikan,dll) pada komoditas ikan untuk ketahanan pangan dan peningkatan kualitas untuk meningkatkan daya saing dan pendapatan masyarakat;
6. Hilirisasi dan komersialisasi teknologi iptek budidaya untuk ketahanan pangan dan aplikasi model di masyarakat;
7. Peningkatan kapasitas riset dan Kerjasama dengan berbagai stakeholder (LN, DN, NGO, Pemda, PT, Asosiasi dan swasta).

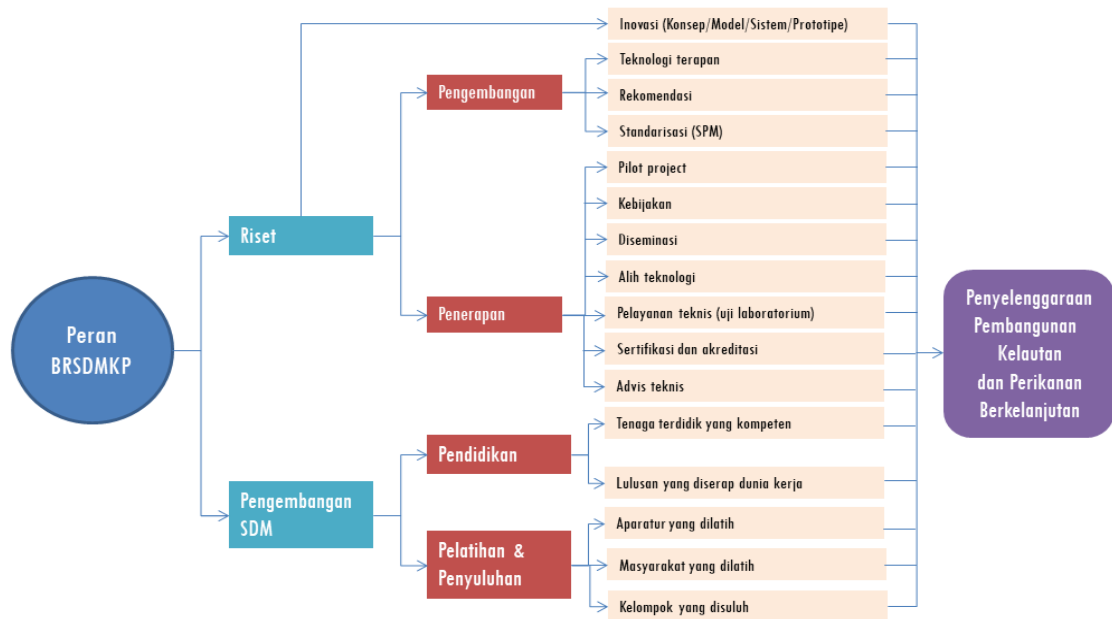
B. Bidang Penyuluhan

1. Peningkatan kolaborasi Penyuluhan dengan Pendidikan, Pelatihan dan Riset dalam sinergi pendidikan, pemanfaatan hasil kajiwidya, dan diseminasi hasil riset terekomendasi kepada masyarakat pelaku utama dan pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan melalui metode penyelenggaraan penyuluhan perikanan;
2. Memberikan pendampingan kepada kelompok pembudidaya dalam hal kelembagaan.

3.7. Sinergi Antar Lembaga lingkup BRSDM

Isu antar lembaga lingkup BRSDM merupakan kegiatan yang bersifat lintas kepakaran dan melibatkan berbagai institusi baik di dalam maupun luar BRSDM yang disusun secara tematik, komprehensif dan berbasis keilmuan. Kegiatan antar lembaga lingkup BRSDM dilaksanakan untuk : a) mendukung pencapaian target pembangunan KP yang sudah ditetapkan oleh KKP; b) pengembangan hasil inovasi IPTEK KP sebagai dasar pengambilan kebijakan; c) optimalisasi peran penyuluh dalam pendampingan pelaku utama untuk implementasi program-program KKP. Inovasi teknologi hasil riset KP yang dikembangkan diujicobakan oleh peneliti di tingkat masyarakat melalui program kegiatan Desa Inovasi/Desa Mitra. Inovasi yang telah siap disebarluaskan, didiseminasikan ke pelaku utama dan pelaku usaha perikanan dengan pendampingan intensif penyuluh perikanan yang dilengkapi dengan sarana berlatih. Periode 2020–2024 telah diagendakan untuk membangun Desa Inovasi di Propinsi terpilih

yang lokasinya akan ditentukan kemudian. Lingkup pengembangan dan penerapan IPTEK BRSDM disajikan pada Gambar 2 berikut ini.



Gambar 3.1. Lingkup Pengembangan dan Penerapan IPTEK BRSDM KP

Dalam melakukan sinergi antar lembaga internal BRSDM KP, BRPBATPP telah melakukan sinergi dengan Balai Riset Pemuliaan Ikan (BRPI) Sukamandi terkait Riset Domestikasi dan Pemuliaan Ikan Lokal Air Tawar. Sedangkan untuk sinergi antar lembaga dalam KKP, BRPBATPP telah melakukan sinergi dengan Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan, Ditjen Perikanan Budidaya terkait rencana pemanfaatan beberapa produk vaksin hasil riset BRPBATPP untuk kegiatan Gerakan Vaksinasi Ikan (Gervikan) secara Nasional yang dicanangkan oleh KKP.

3.8. Strategi Riset Perikanan dan Penyuluhan BRPBATPP

Dengan memperhatikan tujuan dan sasaran kegiatan yang akan dicapai oleh BRPBATPP pada tahun 2021-2024, maka strategi yang dikembangkan adalah sebagai berikut.

1. Sasaran 1 (S-1) Pendampingan kelompok pelaku usaha/utama dalam mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat KP

Strategi : Membangun sistem penyuluhan KP yang bersinergi dengan riset dan pengembangan SDM serta program eselon I lingkup

Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Pemerintah Daerah

Langkah Operasional:

- 1) Penguatan kelembagaan pelaku usaha/masyarakat kelautan dan perikanan (penumbuhan dan peningkatan kelas kelompok)
- 2) Mendiseminasikan inovasi hasil riset teknologi kelautan dan perikanan kepada pelaku utama dan pelaku usaha perikanan
- 3) Mengembangkan sistem informasi penyuluhan kelautan dan perikanan berbasis on-line
- 4) Meningkatkan kapasitas Penyuluh Perikanan berbasis kebutuhan inovasi teknologi adaptif kepada pelaku utama dan pelaku usaha kelautan dan perikanan.
- 5) Mengidentifikasi dan memetakan teknologi kelautan dan perikanan yang dibutuhkan pelaku utama kelautan dan perikanan
- 6) Perlindungan dan pemberdayaan pelaku usaha
- 7) Peningkatan kapasitas pelaku utama dan pelaku usaha sebagai pilar pembangunan ekonomi berbasis komoditas unggulan KP.

2. Sasaran 2 (S-2) Hasil riset dan inovasi BRPBATPP yang dimanfaatkan

Strategi 1 : Menyelenggarakan riset untuk menjawab isu dan masalah bidang perikanan budidaya air tawar

Langkah operasional yang akan dilakukan adalah:

- 1) Merencanakan kegiatan riset sesuai kebutuhan pemangku kepentingan dalam mendukung pengembangan bidang perikanan budidaya air tawar;
- 2) Merancang kegiatan riset bersama untuk membentuk pengetahuan baru sebagai upaya memecahkan persoalan bidang perikanan budidaya air tawar;
- 3) Memanfaatkan teknologi terapan dalam mendukung percepatan industrialisasi Perikanan budidaya air tawar;
- 4) Melestarikan dan melindungi keanekaragaman hayati serta memanfaatkannya melalui budidaya perikanan air tawar;
- 5) Mengkoordinasikan penyelenggaraan riset dasar sebagai basis riset terapan dan eksperimental yang inovatif;
- 6) Menyampaikan teknologi perikanan budidaya air tawar yang direkomendasikan;
- 7) Menyampaikan inovasi teknologi perikanan budidaya air tawar adaptif lokasi;

- 8) Menyampaikan hasil kajian kebijakan (*policy brief*) dalam merespon isu-isu terkini yang bersifat responsif dan antisipatif terhadap isu-isu yang sedang dan potensial berkembang terkait perikanan budidaya air tawar;
- 9) Melakukan pengembangan hasil riset perikanan budidaya air tawar;
- 10) Melakukan pengkajian iptek perikanan budidaya air tawar melalui perekayasa, kliring teknologi, dan audit teknologi.

Strategi 2: Meningkatkan peran riset perikanan budidaya air tawar serta inovasi teknologi dalam mendukung percepatan pembangunan kelautan dan perikanan

Langkah Operasional:

- 1) Menyusun rekomendasi kebijakan riset perikanan budidaya air tawar yang tepat bagi penentu kebijakan;
- 2) Melaksanakan konsultasi, advokasi dan asistensi terhadap implementasi kebijakan berdasarkan hasil riset perikanan budidaya air tawar;
- 3) Meningkatkan dukungan riset dan teknologi perikanan budidaya air tawar dalam pengambilan kebijakan “*science-based policy*”;
- 4) Memperkuat lembaga riset perikanan budidaya air tawar sebagai Pusat Unggulan Iptek dan perolehan akreditasi;
- 5) Mendukung hilirisasi hasil riset perikanan budidaya air tawar ke industri;
- 6) Melakukan kegiatan riset yang inovatif dan implementatif sehingga bisa dimanfaatkan oleh sektor industri perikanan budidaya air tawar.

Strategi 3: Meningkatkan diseminasi hasil riset perikanan budidaya air tawar selaras dengan pengembangan industri kelautan dan perikanan.

Langkah operasional:

- 1) Mengembangkan paket teknologi budidaya air tawar (benih/bibit, pakan, lingkungan budidaya, kesehatan ikan dan lain lain) pada komoditas ekonomi yang berorientasi pada peningkatan produksi dan nilai produksi;
- 2) Melakukan pengembangan domestikasi ikan air tawar endemic (koleksi, karakterisasi-inventarisasi, domestikasi, seleksi/hibridisasi);

- 3) Mengembangkan paket teknologi budidaya air tawar (benih, pakan, lingkungan budidaya, kesehatan ikan, dll) pada komoditas ikan untuk ketahanan pangan dan peningkatan pendapatan masyarakat;
- 4) Melakukan riset terkait dengan pemetaan kampung budidaya ikan air tawar;
- 5) Mendorong alih teknologi/ penyebaran hasil riset budidaya air tawar untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan dan menguasai iptek dan teknologi perikanan;
- 6) Melaksanakankan kegiatan riset perikanan budidaya air tawar yang sesuai kode etik dalam menghasilkan HKI;
- 7) Menyusun program pengembangan riset perikanan budidaya air tawar yang spesifik lokasi;
- 8) Meningkatkan kapasitas lembaga riset perikanan budidaya air tawar (termasuk inovasi dan riset, proses diseminasi) melalui sinergi dan kerja sama yang saling menguatkan;
- 9) Meningkatkan promosi dan diseminasi hasil riset perikanan budidaya air tawar melalui media dan jejaring (nasional maupun internasional) untuk mempercepat capaian pembangunan kelautan dan perikanan, pengakuan ilmiah internasional dan perolehan sumber-sumber pendanaan riset di luar APBN;
- 10) Meningkatkan kualitas layanan riset perikanan budidaya air tawar melalui proses transformasi unit pelayanan teknis (UPT) menjadi BLU;
- 11) Meningkatkan hilirisasi hasil riset perikanan budidaya air tawar untuk mewujudkan masyarakat KP yang berdaya saing berbasis pengetahuan;
- 12) Memperbaiki/meningkatkan sarana prasarana untuk mendukung internasionalisasi diseminasi ilmiah hasil riset perikanan budidaya air tawar;
- 13) Menyusun dan mengusulkan hasil riset perikanan budidaya air tawar untuk diajukan sebagai HKI;
- 14) Mengukur kesiapterapan teknologi riset perikanan budidaya air tawar;
- 15) Melakukan penerapan teknologi riset perikanan melalui kegiatan alih teknologi;
- 16) Melakukan publikasi hasil riset perikanan budidaya air tawar.

Strategi 4: Membangun hubungan melalui jaringan kemitraan dalam kerangka kerja sama riset perikanan budidaya air tawar

Langkah operasional:

1. Membangun jejaring dan tatakelola inovasi untuk meningkatkan inovasi kreatif melalui kemitraan dengan lembaga riset lain;
2. Membangun kerja sama riset perikanan budidaya air tawar (termasuk *capacity building*) dengan lembaga/instansi lingkup nasional dan internasional;
3. Menggunakan jejaring teknologi informasi digital dalam melaksanakan kegiatan riset perikanan budidaya air tawar.

3. Sasaran 3 (S-3) Tersedianya Data, Informasi dan Rekomendasi Kebijakan Hasil Riset BRPBATPP

Strategi : Menyelenggarakan riset data dan informasi bidang perikanan budidaya air tawar

Langkah operasional yang akan dilakukan adalah:

- 1) Merencanakan kegiatan riset data dan informasi sesuai kebutuhan pemangku kepentingan dalam mendukung pengembangan bidang perikanan budidaya air tawar;
- 2) Menyusun data dan informasi riset perikanan budidaya air tawar.

4. Sasaran 4 (S-4) Tersedianya Produk dan Prototipe Hasil Riset BRPBATPP

Strategi : Menyelenggarakan riset teknologi dan produk biologi bidang perikanan budidaya air tawar

Langkah operasional yang akan dilakukan adalah:

- 1) Merencanakan kegiatan riset teknologi dan produk biologi bidang perikanan budidaya air tawar sesuai kebutuhan pemangku kepentingan dalam mendukung pengembangan bidang perikanan budidaya air tawar;
- 2) Menghasilkan teknologi dan produk biologi perikanan budidaya air tawar (rilis ikan, kandidat HKI, vaksin, probiotik, dan sebagainya);
- 3) Menyusun dan mengusulkan hasil riset perikanan budidaya air tawar untuk diajukan sebagai HKI;
- 4) Menyusun naskah akedemis untuk rilis ikan air tawar;
- 5) Melakukan publikasi hasil riset perikanan budidaya air tawar.

5. Sasaran 5 (S-5) Tersedianya Sarana dan Prasarana Riset BRPBATPP

Strategi : Pemenuhan Sarana dan Prasarana kegiatan riset perikanan budidaya air tawar sesuai dengan standar yang telah ditentukan

Langkah operasional yang akan dilakukan adalah :

- 1) Mengidentifikasi dan memetakan sarana dan prasarana kegiatan riset perikanan budidaya air tawar yang ada saat ini;
- 2) Menyiapkan perangkat/sarana untuk kegiatan riset perikanan budidaya air tawar;
- 3) Meningkatkan kapasitas sarana prasarana kegiatan riset perikanan budidaya air tawar sesuai standar;
- 4) Melakukan penguatan sarana prasarana yang menunjang kegiatan riset perikanan budidaya air tawar.

6. Sasaran 6 (S-6) Tersedianya Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Riset BRPBATPP

Strategi : Pemenuhan Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Riset BRPBATPP

Langkah operasional yang akan dilakukan adalah :

- 1) Mengidentifikasi Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (NSPK) untuk kegiatan riset perikanan budidaya air tawar (SOP untuk kegiatan riset, manajerial, dan sebagainya) yang telah diterapkan di BRPBATPP;
- 2) Menyiapkan dan menyusun Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (NSPK) kegiatan riset perikanan budidaya air tawar sesuai standar yang berlaku (SOP kegiatan riset, manajerial, dan sebagainya);
- 3) Menerapkan Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (NSPK) kegiatan riset perikanan budidaya air tawar sesuai standar yang berlaku (SOP kegiatan riset, manajerial, dan sebagainya);
- 4) Menyiapkan SDM dengan keterampilan teknologi informasi;
- 5) Mengembangkan sertifikasi kompetensi KP berkerja sama dengan Lembaga Sertifikasi Profesi;
- 6) Melakukan akreditasi dan sertifikasi kelembagaan BRPBATPP yang terstandar bekerjasama dengan lembaga sertifikasi terstandar (ISO, KNAPP, SNI, dan sebagainya).

7. Sasaran 7 (S-7) Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan

Strategi : Menyelenggarakan kegiatan penyuluhan untuk pelaku utama/usaha kelautan dan perikanan

Langkah operasional yang akan dilakukan adalah :

- 1) Melaksanakan diseminasi hasil riset kepada pelaku utama / usaha bekerja sama dengan peneliti dengan tujuan saling menguatkan;
- 2) Membuat publikasi hasil riset dengan menggunakan bahasa penyuluhan yang lebih mudah dipahami dan menyesuaikan dengan kebutuhan pelaku utama/pelaku usaha;
- 3) Memanfaatkan teknologi informasi dalam rangka memperluas jangkauan layanan penyuluhan di sentra budidaya KP;
- 4) Mengembangkan metode penyuluhan sesuai kebutuhan pelaku utama;
- 5) Penguatan kelembagaan penyuluhan KP, meliputi sinergitas dan koordinasi dengan kelembagaan penyuluhan tingkat regional dan pemerintah daerah, serta penguatan kelompok pelaku utama KP.
- 6) Pengembangan Metode dan Materi Penyuluhan melalui Pengembangan materi penyuluhan bentuk cetak, CD video, web; Penyuluhan dengan media cetak, tertayang dan terdengar, Pemanfaatan sms gateway, web (cyber extension); dan temu lapang : aplikasi, percontohan, dll.

8. Sasaran 8 (S-8) Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup BRPBATPP

Strategi : Membangun dan memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik di lingkup BRPBATPP

Langkah operasional yang akan dilakukan adalah :

- 1) Memperkuat tata kelola dan kerjasama riset dan pengembangan SDM yang dilandasi prinsip-prinsip konsultatif, komprehensif, fleksibel, transparan;
- 2) Meningkatkan pranata dan kelembagaan birokrasi yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima melalui pembinaan dan pendampingan Reformasi Birokrasi, pelaksanaan SAKIP, dan menuju satker berstatus WBK/WBBM;
- 3) Pengelolaan perencanaan dan anggaran pembangunan secara akuntabel;
- 4) Pengelolaan keuangan sesuai prinsip pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien,

ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

3.9. Kegiatan Prioritas Riset dan Penyuluhan BRPBATPP

Untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan KP, kegiatan prioritas riset dan penyuluhan BRPBATPP pada Tahun 2021-2024, adalah :

A. Kegiatan Prioritas Riset Perikanan

Kegiatan prioritas riset perikanan pada periode 2021-2024 diarahkan untuk menghasilkan riset perikanan yang difokuskan pada :

1. Produk biologi (Induk dan benih unggul, vaksin, probiotik)
2. Paket Teknologi Perikanan tangkap, budidaya dan pengolahan
3. Data dan/atau Informasi Riset Perikanan yang Dihasilkan
4. Inovasi Teknologi Adaptif Lokasi Perikanan
5. Sarana Prasarana Riset Perikanan

B. Kegiatan Prioritas Penyuluhan

Kegiatan prioritas penyuluhan KP pada periode 2021-2024 diarahkan untuk meningkatkan kualitas penyuluhan KP yang difokuskan pada :

1. Kelompok Pelaku Utama/Usaha yang Mendapatkan Pendampingan dari Penyuluh KP
2. Penguatan kelembagaan kelompok KP
3. Fasilitasi UMKM untuk mendapatkan izin usaha di sektor KP
4. Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang diterapkan

3.10. Kerangka Regulasi

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, selain mengenal kerangka anggaran, juga terdapat kerangka regulasi yang mempengaruhi kinerja pembangunan nasional. Kementerian Kelautan dan Perikanan, dalam Renstra BRSDM Tahun 2021-2024, memerlukan kerangka regulasi yang merupakan perencanaan pembentukan regulasi untuk memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara.

Kerangka regulasi dalam Rencana Strategis BRPBATPP Tahun 2021-2024, disiapkan mengacu pada program legislasi nasional dan KKP, yang meliputi:

- 1) Rancangan Peraturan Menteri tentang Kawasan Pengelolaan Perikanan Perairan Umum Daratan;

- 2) Rancangan Peraturan Menteri tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Penilaian Angka Kredit Penyuluh Perikanan;
- 3) Rancangan Peraturan Menteri tentang Tata Cara Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan Melalui Penyesuaian/Inpassing;
- 4) Rancangan Peraturan Menteri tentang Tata Cara Inventarisasi Data dan Informasi Bidang Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Perikanan;
- 5) Rancangan Peraturan Menteri tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Perikanan Jangka Pendek;
- 6) Rancangan Peraturan Menteri tentang Tata Cara Penetapan Rencana Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Perikanan;
- 7) Rancangan Peraturan Menteri tentang Mekanisme Kerja Kelembagaan Penyuluhan Perikanan;
- 8) Rancangan Peraturan Menteri tentang Penilaian dan Penetapan Kelompok Perikanan Teladan/Berprestasi Nasional Pusluh KP;
- 9) Rancangan Peraturan Menteri tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan;
- 10) Rancangan Peraturan Menteri tentang Pedoman Umum Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan;
- 11) Rancangan Peraturan Menteri tentang Penerapan Jenjang Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Perikanan;
- 12) Rancangan Keputusan Menteri tentang Pelepasan Ikan;
- 13) Perubahan Permen KP tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan, Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan, Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan, Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan;
- 14) Rancangan Permen tentang Kawasan Perikanan Perairan Umum Daratan;
- 15) Rancangan Permen tentang Pedoman Penyuluhan Perikanan;
- 16) Rancangan Regulasi untuk hilirisasi dan komersialisasi hasil riset.

Selain itu, Rancangan Peraturan dan Keputusan Kepala BRSDM Terkait Pelatihan dan Penyuluhan KP tentang :

- ✓ Penugasan Penyuluh Perikanan PNS;
- ✓ Penetapan Kinerja Penyuluh Perikanan;
- ✓ Wilayah Kerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan serta Balai Riset dan Penyuluhan.

3.1.1. Kerangka Kelembagaan

Perubahan kelembagaan terkait struktur organisasi menjadi faktor pendukung capaian kinerja lingkup BRPBATPP. Kerangka kelembagaan merupakan perangkat kementerian/lembaga (struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan aparatur sipil negara) untuk melaksanakan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, serta kegiatan pembangunan, sesuai dengan tugas maupun fungsi kementerian/lembaga yang disusun (berpedoman pada RPJM Nasional). Pedoman penyusunan kerangka kelembagaan BRPBATPP, berpedoman pada target kinerja dan struktur kelembagaan yang ada di tingkat KKP.

Penguatan kapasitas kelembagaan BRPBATPP berdasarkan Renstra BRPBATPP Tahun 2021-2024, dilaksanakan dengan memperhatikan :

- Perubahan paradigma pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan dari production oriented ke people oriented;
- Mandat yang diberikan (konstitusional, teknis, pembangunan, serta organisasi);
- Kebijakan pembangunan, kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, peraturan perundangan terkait yang berlaku;
- Prinsip-prinsip pengorganisasian yang right sizing, unified function, efektif, efisien, serta transparan, sesuai dengan bisnis proses (Business Process Management) pembangunan kelautan dan perikanan.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN PENDANAAN

4.1. Target Kinerja

4.1.1. Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Sasaran Strategis yang telah ditetapkan KKP merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome/impact*) dari satu atau beberapa program. Sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh KKP sebagai suatu *outcome/impact* dari beberapa program yang dilaksanakan. Dalam penyusunannya menggunakan pendekatan metoda *Balanced Scorecard* (BSC) yang dibagi dalam empat perspektif, yakni *stakeholders prespective*, *customer perspective*, *internal process perspective*, dan *learning and growth perspective*. Sasaran strategis KKP kemudian diturunkan dan dibagi habis ke seluruh unit kerja eselon 1 KKP termasuk BRSDM KP. Sasaran strategis BRSDM KP kemudian diturunkan dan dibagi habis di level satuan kerja eselon 2 dan eselon 3 dibawahnya.

Indikator Kinerja Kegiatan merupakan ukuran alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (*output*) dari suatu kegiatan. Indikator Kinerja Kegiatan telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran kegiatan (*output*). Indikator Kinerja Kegiatan dalam Struktur Manajemen Kinerja di KKP merupakan sasaran kinerja kegiatan yang secara akuntabilitas berkaitan dengan unit organisasi K/L setingkat. Indikator Kinerja BRPBATPP tahun 2021-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1. Indikator Kinerja BRPBATPP tahun 2021-2024

NO	SASARAN STRATEGIS RENSTRA KKP	SASARAN PROGRAM BRSDM	SASARAN KEGIATAN PUSLATLUH	SASARAN STRATEGIS PUSRISKAN	SASARAN KEGIATAN BRPBATPP	NO	IKS	SATUAN	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET
									2021	2022	2023	2024
1	SS1. Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat KP	SP 1. Pendampingan kelompok pelaku usaha/utama mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat KP	SK 1. Pendampingan kelompok pelaku usaha/utama dalam mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat KP		S.01.Pendampingan kelompok pelaku usaha/utama dalam mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat KP	1	Kelompok kelautan dan perikanan yang ditingkatkan kelasnya di Satminkal BRPBATPP	Kelompok	75	75	75	75
						2	Kelompok kelautan dan perikanan yang dibentuk di Satminkal BRPBATPP	Kelompok	150	150	150	150
2	SS 5. Hasil riset dan inovasi yang dimanfaatkan	SP 5. Hasil riset dan inovasi yang dimanfaatkan		SS 2. Hasil riset dan inovasi perikanan yang dimanfaatkan	S.02. Hasil riset dan inovasi BRPBATPP yang dimanfaatkan	1	Hasil riset BRPBATPP yang dimanfaatkan oleh sektor industri	Paket	1	0	0	0
				SS 3. Tersedianya Data, Informasi dan Rekomendasi Kebijakan Hasil Riset Perikanan	S.03. Tersedianya Data, Informasi dan Rekomendasi Kebijakan Hasil Riset BRPBATPP	1	Data dan/atau informasi hasil riset BRPBATPP	Paket	1	1	1	1
						2	Karya Tulis Ilmiah BRPBATPP yang dipublikasikan	Dokumen	30	30	30	30
				SS 4. Tersedianya Produk dan Prototipe Hasil Riset Perikana	S.04. Tersedianya Produk dan Prototipe Hasil Riset BRPBATPP	1	Teknologi hasil riset BRPBATPP	Paket	5	5	5	5
						2	Produk biologi hasil riset BRPBATPP	Paket	2	2	2	2

NO	SASARAN STRATEGIS RENSTRA KKP	SASARAN PROGRAM BRSDM	SASARAN KEGIATAN PUSLATLUH	SASARAN STRATEGIS PUSRISKAN	SASARAN KEGIATAN BRPBATPP	NO	IKS	SATUAN	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET
									2021	2022	2023	2024
				SS 5. Tersedianya Sarana dan Prasarana Riset Perikanan	S.05. Tersedianya Sarana dan Prasarana Riset BRPBATPP	1	Sarana dan Prasarana BRPBATPP yang ditingkatkan kapasitasnya	Paket	2	1	1	1
				SS 6. Tersedianya Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Riset Perikanan	S.06. Tersedianya Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Riset BRPBATPP	1	Sertifikasi kelembagaan BRPBATPP yang terstandar	Lembaga	1	1	1	1
			SK 5. Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan		S.07. Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	1	Jumlah Kelompok Pelaku utama/ Pelaku Usaha yang disuluh di BRPBATPP	Kelompok	3.464	3.664	4.175	4.686
						2	Jumlah Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang diterapkan di BRPBATPP	Produk	1	3	4	5
3	SS 9. Tatakelola pemerintahan yang baik	SP6. Tatakelola pemerintahan yang baik pada BRSDM	SK 8. Tatakelola pemerintahan yang baik	SS 7. Tata Kelola pemerintahan yang baik pada Pusat Riset Perikanan	S.08. Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup BRPBATPP	1	Jejaring dan/atau kerjasama BRPBATPP yang disepakati dan / atau ditindaklanjuti	Dokumen	3	3	3	3
						2	Indeks Profesionalitas ASN BRPBATPP	Indeks	73	74	75	76

NO	SASARAN STRATEGIS RENSTRA KKP	SASARAN PROGRAM BRSDM	SASARAN KEGIATAN PUSLATLUH	SASARAN STRATEGIS PUSRISKAN	SASARAN KEGIATAN BRPBATPP	NO	IKS	SATUAN	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET
									2021	2022	2023	2024
						3	Persentase unit kerja BRPBATPP yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar	%	84	84	84	84
						4	Nilai IKPA BRPBATPP	Nilai	89	89	89	89
						5	Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas LK BRPBATPP	%	1	1	1	1
						6	Nilai Kinerja Anggaran BRPBATPP	Nilai	86	86	86	86
						7	Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal Riset Perikanan BRPBATPP	%	100	100	100	100
						8	Persentase layanan dukungan manajemen internal Penyuluhan Kelautan dan Perikanan BRPBATPP	%	100	100	100	100
						9	Nilai Rekonsiliasi Kinerja BRPBATPP	Nilai	80	80	80	80

4.1.2. Indikator Kinerja Program

Indikator Kinerja Program merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian hasil (*outcome*) dari suatu program. Indikator Kinerja Program telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran program (*outcome*). Indikator kinerja program tersebut juga merupakan Kerangka Akuntabilitas Organisasi dalam mengukur pencapaian kinerja program.

Dalam kaitan ini, KKP telah menetapkan Indikator Kinerja Program dalam Struktur Manajemen Kinerja yang merupakan sasaran kinerja program yang secara akuntabilitas berkaitan dengan unit organisasi K/L setingkat Eselon I A.

4.1.3. Indikator Kinerja Kegiatan

Program kegiatan kerja BRPBATPP sesuai rencana strategis tahun 2020-2024 adalah riset perikanan budidaya air tawar dan penyuluhan perikanan dengan kegiatan meliputi:

- 1) Pendampingan melalui penyuluhan kepada pelaku utama/usaha berupa peningkatan kelas kelompok serta pendampingan pelaku utama/usaha menjadi UMKM-KP yang mendapat kemudahan akses pembiayaan, pemasaran dan pembuatan ijin usaha;
- 2) Pendampingan melalui penyuluhan kepada pelaku utama/usaha berupa penumbuhan kelompok perikanan;
- 3) Penyelenggaraan riset perikanan budidaya air tawar yang menghasilkan output Hasil riset BRPBATPP yang dimanfaatkan oleh sektor industri;
- 4) Penyelenggaraan riset perikanan budidaya air tawar yang menghasilkan output data dan informasi perikanan;
- 5) Penyusunan dan pembuatan karya tulis ilmiah hasil riset perikanan budidaya air tawar baik untuk prosiding, jurnal nasional maupun internasional;
- 6) Penyelenggaraan riset perikanan budidaya air tawar yang menghasilkan output teknologi hasil riset perikanan;
- 7) Penyelenggaraan riset perikanan budidaya air tawar yang menghasilkan output produk biologi hasil riset perikanan;
- 8) Peningkatan kapasitas sarana dan prasarana dalam rangka menunjang kegiatan;
- 9) Sertifikasi kelembagaan untuk meningkatkan kualitas hasil-hasil kegiatan;
- 10) Penyelenggaraan penyuluhan kepada pelaku utama/usaha kelautan dan perikanan;

- 11) Penyelenggaraan penyuluhan dengan melakukan percontohan kegiatan kelautan dan perikanan yang diterapkan;
- 12) Pelaksanaan rintisan dan pengelolaan kerjasama baik dengan sesama lembaga riset, perguruan tinggi, balai benih ikan/ UPT daerah, serta dengan pihak swasta;
- 13) Pengukuran indeks profesionalitas ASN Lingkup BRPBATPP;
- 14) Perhitungan persentase unit kerja lingkup BRPBATPP yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar melalui aplikasi Bitrix.
- 15) Perhitungan nilai IKPA lingkup BRPBATPP;
- 16) Perhitungan penyelesaian temuan LHP BPK oleh BRPBATPP;
- 17) Perhitungan nilai kinerja anggaran BRPBATPP berdasarkan data OMSPAN;
- 18) Menyediakan dokumen layanan dukungan manajemen internal riset perikanan BRPBATPP;
- 19) Menyediakan dokumen layanan dukungan manajemen internal penyuluhan kelautan dan perikanan BRPBATPP;
- 20) Perhitungan nilai rekonsiliasi kinerja BRPBATPP.

4.2. Kerangka Pendanaan

Untuk dapat melaksanakan arah kebijakan, strategi, dan program pelatihan dan penyuluhan kelautan dan perikanan, serta mencapai target sasaran utama, dibutuhkan dukungan kerangka pendanaan yang memadai. Pendanaan pelatihan dapat bersumber dari pemerintah (APBN dan APBD, Dana Alokasi Khusus/DAK), swasta, perbankan dan non perbankan, dan masyarakat. Pendanaan akan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yakni kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan. Sementara itu dilakukan penguatan sinergi pendanaan antara KKP, K/L terkait, APBD serta sumber lain yang tidak mengikat. Pendanaan tersebut akan didistribusikan setiap tahunnya untuk membiayai Program Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan sebagaimana Lampiran II.

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan riset perikanan budidaya air tawar dan penyuluhan perikanan untuk 5 tahun, yang disusun sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Pusat Riset Perikanan dan Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP yang berada di bawah Badan Riset dan Sumber Daya Manusia KP yang mengacu kepada Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 dengan mengacu pada RPJMN periode 2020-2024.

Rencana Strategis ini disusun sebagai upaya untuk memberikan pedoman atau panduan dalam melaksanakan kegiatan riset perikanan budidaya air tawar dan penyuluhan perikanan tahun 2020 – 2024 sehingga sesuai dengan program yang telah ditetapkan.

Namun demikian, seiring dengan waktu dan dengan dinamisnya perubahan serta adanya tuntutan pengembangan organisasi dan masyarakat, sangat mungkin terdapat beberapa hal yang belum terakomodir dalam Renstra ini. Dengan adanya perubahan tersebut, maka renstra ini perlu dilakukan reviu untuk memenuhi target dan arahan serta kebijakan KKP.

Lampiran II.

Keputusan Kepala Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan Nomor : 239/BRSDM-BRPBATPP/RC.221/VII/2021 Tentang Rencana Strategis Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan Tahun 2020 – 2024 Sebagai Perubahan Atas Keputusan Kepala Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan Nomor 367/BRSDM-BRPBATPP/RC.221/X/2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Kepala BRPBATPP Nomor 214/BRSDM-BRPBATPP/RC.221/V/2020 Tentang Rencana Strategis Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan Tahun 2020 – 2024

Kerangka Pendanaan BRPBATPP Tahun 2021-2024

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020-2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
		(Akhir)	(Rev 5)				(Akhir)	(Rev 5)				
TOTAL BRPBATPP							57.29	55.57	70.76	74.28	75.77	333.67
Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi							8.91	8.51	11.06	13.95	14.58	57.01
Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan							8.91	8.51	11.06	13.95	14.58	57.01
Inovasi yang diterapkan sebagai percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan							0.09	0.06	0.31	0.39	0.40	1.25
Jumlah Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang diterapkan di BRPBATPP (produk)		1	1	3	4	5	0.09	0.06	0.31	0.39	0.40	1.25
Kelompok Pelaku Utama/Usaha yang Mendapatkan Pendampingan dari Penyuluh KP							8.82	8.45	10.76	13.55	14.18	55.76
Kelompok kelautan dan perikanan yang ditingkatkan kelasnya di Satminkal BRPBATPP (Kelompok)		-	75	75	75	75						
Kelompok kelautan dan perikanan yang dibentuk di Satminkal BRPBATPP (Kelompok)		-	150	150	150	150						
Jumlah Kelompok Pelaku utama/ Pelaku Usaha yang disuluh di BRPBATPP (kelompok)		3.511	3.464	3.664	4.175	4.686						

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020-2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
		(Akhir)	(Rev 5)				(Akhir)	(Rev 5)				
Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi							2.37	1.94	8.30	8.93	9.79	31.32
Riset Perikanan							2.37	1.94	8.30	8.93	9.79	31.32
Hasil riset yang dimanfaatkan oleh sektor industri							-	-	-	-	-	-
Hasil riset BRPBATPP yang dimanfaatkan oleh sektor industri (paket)		1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Data dan/atau Informasi Hasil Riset Perikanan							0.38	0.17	0.42	0.42	0.42	1.81
Data dan/atau informasi hasil riset BRPBATPP (paket)		1	1	1	1	1	0.38	0.17	0.42	0.42	0.42	1.81
Karya Tulis Ilmiah BRPBATPP yang dipublikasikan (dokumen)		30	30	30	30	30	-	-	-	-	-	
Produk Biologi Hasil Riset Perikanan							0.44	0.48	0.38	0.71	0.67	2.67
Produk biologi hasil riset BRPBATPP (paket)		1	2	2	2	2	0.44	0.48	0.38	0.71	0.67	2.67
Sarana Riset Perikanan							0.13	0.43	3.10	3.00	3.50	10.16
Sarana dan Prasarana BRPBATPP yang ditingkatkan kapasitasnya		1	2	1	1	1	0.13	0.43	3.10	3.00	3.50	10.16
Sertifikasi kelembagaan BRPBATPP yang terstandar		1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-
Teknologi Hasil Riset Perikanan							1.42	0.87	4.40	4.80	5.20	16.69
Teknologi hasil riset BRPBATPP (paket)		5	5	5	5	5	1.42	0.87	4.40	4.80	5.20	16.69
Program Dukungan Manajemen							46.02	45.12	51.40	51.40	51.40	245.34
Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan												
Layanan Perkantoran Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan		1	1	1	1	1						-
Layanan Perkantoran Riset Perikanan		1	1	1	1	1						
Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal Riset Perikanan		-	1	1	1	1						
Layanan Umum Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan		1	1	1	1	1						
Layanan Umum Riset Perikanan		1	1	1	1	1						
Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan perikanan		-	1	1	1	1						
Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal Riset Perikanan		-	1	1	1	1						

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020-2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
		(Akhir)	(Rev 5)				(Akhir)	(Rev 5)				
Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup BRPBATPP												
Jejaring dan/atau kerjasama BRPBATPP yang		3	3	3	3	3						
Indeks Profesionalitas ASN BRPBATPP		72	73	74	75	76						
Persentase unit kerja BRPBATPP yang menerapkan		82	84	84	84	84						
Nilai IKPA BRPBATPP		-	89	89	89	89						
Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas LK BRPBATPP		1	1	1	1	1						
Nilai Kinerja Anggaran BRPBATPP		85	86	86	86	86						
Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal		-	100	100	100	100						
Persentase layanan dukungan manajemen internal		-	100	100	100	100						
Nilai Rekonsiliasi Kinerja BRPBATPP		-	80	80	80	80						

Lampiran III.

Keputusan Kepala Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan Nomor : 239/BRSDM-BRPBATPP/RC.221/VII/2021 Tentang Rencana Strategis Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan Tahun 2020 – 2024 Sebagai Perubahan Atas Keputusan Kepala Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan Nomor 367/BRSDM-BRPBATPP/RC.221/X/2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Kepala BRPBATPP Nomor 214/BRSDM-BRPBATPP/RC.221/V/2020 Tentang Rencana Strategis Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan Tahun 2020 – 2024

Paten Kegiatan Riset BRPBATPP TA.2019 – 2021

No	Judul Sertifikat Paten	Nomor Sertifikat	Tanggal Sertifikat	Inventor	Deskripsi	Fungsi	Keunggulan
1	Probiotik Berbahan Dasar Bakteri untuk Pengendali Senyawa Nitrogen pada Budidaya Ikan Air Tawar	IDS000002445	17 Juli 2019	1. Yosmaniar 2. Tuti Sumiati 3. Ani Widiyati 4. Tri Heru Prihadi 5. Brata Pantjara	Komposisi Probiotik Berbahan dasar bakteri untuk pengendali senyawa Nitrogen pada budidaya ikan air tawar	Mengurangi limbah Nitrogen, mengoptimalkan kualitas air, dan menekan mortalitas pada budidaya ikan air tawar.	Dapat memperbaiki kualitas air, meningkatkan pertumbuhan ikan dan menekan mortalitas ikan budidaya

No	Judul Sertifikat Paten	Nomor Sertifikat	Tanggal Sertifikat	Inventor	Deskripsi	Fungsi	Keunggulan
2	Vaksin Kombinasi <i>Aeromonas hydrophila</i> - <i>Streptococcus agalactiae</i> untuk Ikan Nila (<i>Oreochromis niloticus</i>) dan Proses Pembuatannya	IDP000065965	31 Desember 2019	1. Tuti Sumiati 2. Desy Sugiani 3. Angela Marianan Lusiastuti 4. Taukhid 5. Uni Purwaningsih	Vaksin bivalen anti <i>Aeromonas hydrophila</i> dan <i>Streptococcus agalactiae</i> untuk pencegahan penyakit Motile Aeromonads Septicaemia (MAS) dan Streptococcosis pada ikan nila (<i>Oreochromis niloticus</i>)	Meningkatkan respons imun spesifik pada ikan nila, sehingga dapat meminimalkan resiko ikan nila terjadi ko-infeksi bakteri <i>Aeromonas hydrophila</i> dan <i>Streptococcus agalactiae</i>	Dapat meningkatkan sintasan ikan nila hingga 15 %
3	Vaksin Bivalen Kombinasi <i>Mycobacterium fortuitum</i> dan <i>Aeromonas hydrophila</i> dan Proses Pembuatannya	IDP000071864	1 Oktober 2020	1. Desy Sugiani 2. Uni Purwaningsih 3. Angela Mariana Lusiastuti 4. Taukhid 5. Tatik Mufidah 6. Yani Aryati	Vaksin bivalen anti <i>Aeromonas hydrophila</i> dan <i>Mycobacterium fortuitum</i> untuk pencegahan penyakit Motile Aeromonads Septicaemia (MAS) dan Mycobacteriosis (TBC) pada ikan gurami (<i>Osphronemus gouramy</i>)	Meningkatkan respons imun spesifik pada ikan gurame, sehingga dapat meminimalkan resiko ikan gurame terjadi ko-infeksi bakteri <i>Aeromonas hydrophila</i> dan <i>Mycobacterium fortuitum</i>	Dapat meningkatkan sintasan ikan gurame hingga 15 %

No	Judul Sertifikat Paten	Nomor Sertifikat	Tanggal Sertifikat	Inventor	Deskripsi	Fungsi	Keunggulan
4	SEDIAAN PROBIOTIK BIVALEN <i>Bacillus subtilis</i> P23 DAN <i>Staphylococcus lentus</i> L1k UNTUK IKAN AIR TAWAR DAN PROSES PEMBUATANNYA	IDP000077159	31 Mei 2021	1. Angela Mariana Lusiastuti 2. Munti Yunaha 3. Taukhid 4. Desy Sugiani 5. Yani Aryati 6. Hessy Novita 7. Widanarni	Probiotik yang mengandung bakteri <i>Bacillus subtilis</i> P23 dan <i>Staphylococcus lentus</i> L1k untuk menekan pertumbuhan patogen <i>Aeromonas hydrophila</i> yang hidup di air dan meningkatkan respon kekebalan non spesifik pada ikan air tawar.	Menekan pertumbuhan patogen <i>Aeromonas hydrophila</i> yang hidup di air dan meningkatkan respon kekebalan non spesifik pada ikan air tawar.	Dapat meningkatkan tingkat kelulusan hidup ikan akibat penyakit MAS berkisar 15% dibandingkan dengan tanpa aplikasi probiotik.

Lampiran IV.

Keputusan Kepala Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan Nomor : 239/BRSDM-BRPBATPP/RC.221/VII/2021 Tentang Rencana Strategis Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan Tahun 2020 – 2024 Sebagai Perubahan Atas Keputusan Kepala Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan Nomor 367/BRSDM-BRPBATPP/RC.221/X/2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Kepala BRPBATPP Nomor 214/BRSDM-BRPBATPP/RC.221/V/2020 Tentang Rencana Strategis Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan Tahun 2020 – 2024

Analisis SWOT Penentuan Strategi Pelaksanaan Kegiatan Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan Tahun 2021-2024

1. Analisis Lingkungan Internal

a. Kekuatan (*Strength*)

Kekuatan adalah kemampuan, kesanggupan dan daya yang dimiliki oleh BRPBATPP yang memungkinkan untuk dikembangkan, digali dan dijadikan sebagai sarana untuk menghasilkan kegiatan riset perikanan budidaya air tawar dan penyuluhan perikanan yang unggul dan berdaya saing yaitu:

1. Memiliki SDM yang kompeten di bidang riset perikanan budidaya air tawar dan penyuluhan perikanan
2. Memiliki sertifikasi Laboratorium Uji berdasarkan Sertifikat Akreditasi KAN
3. Memiliki sertifikasi lembaga sebagai Pusat Unggulan IPTEK dengan tema “Budidaya Air Tawar”
4. Memiliki hasil riset yang telah dipatenkan
5. Kemampuan menyelenggarakan sistem penyuluhan terpadu serta kegiatan percontohan penyuluhan

b. Kelemahan (*Weakness*)

Kelemahan merupakan keterbatasan atau kekurangan dalam sumber daya, keterampilan, dan kapabilitas yang secara efektif menghambat kinerja lingkup BRPBATPP. Keterbatasan yang berhasil diidentifikasi diantaranya adalah:

1. Sarana prasarana riset perikanan yang tersedia masih memerlukan revitalisasi
2. Jumlah publikasi internasional masih terbatas

3. Rasio pelaku utama/usaha terhadap jumlah penyuluh dan penyebarannya belum memadai
4. Peran penyuluh dalam mendampingi pelaksanaan program pembangunan KP belum optimal

2. Analisis Lingkungan Eksternal

a. Peluang (*Opportunities*)

Peluang adalah situasi penting yang menguntungkan dalam lingkungan kegiatan riset perikanan budidaya air tawar dan penyuluhan perikanan yaitu:

1. Era Industri 4.0 dan Society 5.0
2. Banyak terdapat forum pertemuan ilmiah tingkat nasional dan internasional
3. Jejaring IPTEK dan SDM di seluruh wilayah Indonesia
4. Kerjasama lintas sektoral dan lembaga terkait penyelenggaraan riset perikanan baik nasional maupun internasional

b. Ancaman (*Threats*)

Ancaman adalah situasi penting yang tidak menguntungkan dalam lingkungan sehingga mengganggu kinerja BRPBATPP, yaitu:

1. Persaingan dengan tenaga kerja dari luar negeri di era perdagangan bebas
2. Adanya persyaratan kompetensi bagi tenaga kerja kelautan dan perikanan yang tersertifikasi
3. Isu lingkungan (climate change, marine debris, IUU fishing, dll) masih menjadi perhatian dunia.

Dari hasil identifikasi terhadap faktor-faktor yang menjadi kekuatan (*Strength*), kelemahan (*Weakness*), peluang (*Opportunities*) dan ancaman (*Threats*) maka Strategi Pelaksanaan Kegiatan Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan Tahun 2021-2024 berdasarkan analisis SWOT adalah sebagai berikut:

Matrik SWOT BRPBATPP		PELUANG (O)				ANCAMAN (T)		
		Era Industri 4.0 dan Society 5.0	Banyak terdapat forum pertemuan ilmiah tingkat nasional dan internasional	Jejaring IPTEK dan SDM di seluruh wilayah Indonesia	Kerjasama lintas sektoral dan lembaga terkait penyelenggaraan riset perikanan baik nasional maupun internasional	Persaingan dengan tenaga kerja dari luar negeri di era perdagangan bebas	Adanya persyaratan kompetensi bagi tenaga kerja kelautan dan perikanan yang tersertifikasi	Isu lingkungan (climate change, marine debris, IUU fishing, dll) masih menjadi perhatian dunia
K E K U A T A N (S)	Memiliki SDM yang kompeten di bidang riset perikanan budidaya air tawar dan penyuluhan perikanan	Meningkatkan kompetensi SDM bidang riset maupun penyuluhan perikanan serta SDM pendukung untuk menghadapi era industri 4.0 dan society 5.0	Ikut serta aktif dalam forum pertemuan ilmiah di tingkat nasional / internasional	Ikut serta aktif dalam jejaring IPTEK dan SDM di seluruh wilayah Indonesia	Meningkatkan kerjasama antar lembaga terkait kegiatan riset baik nasional maupun internasional	Meningkatkan kompetensi SDM bidang riset maupun penyuluhan perikanan serta SDM pendukung untuk menghadapi persaingan tenaga kerja dalam menghadapi era perdagangan bebas	Meningkatkan kompetensi SDM bidang riset maupun penyuluhan perikanan serta SDM pendukung melalui pelatihan yang bersertifikasi baik secara mandiri maupun anggaran APBN	Meningkatkan kompetensi SDM bidang riset maupun penyuluhan perikanan melalui pelatihan yang bersertifikasi terkait manajemen lingkungan baik secara mandiri maupun anggaran APBN

Matrik SWOT BRPBATPP		PELUANG (O)				ANCAMAN (T)		
		Era Industri 4.0 dan Society 5.0	Banyak terdapat forum pertemuan ilmiah tingkat nasional dan internasional	Jejaring IPTEK dan SDM di seluruh wilayah Indonesia	Kerjasama lintas sektoral dan lembaga terkait penyelenggaraan riset perikanan baik nasional maupun internasional	Persaingan dengan tenaga kerja dari luar negeri di era perdagangan bebas	Adanya persyaratan kompetensi bagi tenaga kerja kelautan dan perikanan yang tersertifikasi	Isu lingkungan (climate change, marine debris, IUU fishing, dll) masih menjadi perhatian dunia
	Memiliki sertifikasi Laboratorium Uji berdasarkan Sertifikat Akreditasi KAN	Memanfaatkan sertifikasi Lab Uji yang ada untuk melakukan riset maupun menghasilkan PNPB dalam rangka meningkatkan performa BRPBATPP sebagai lembaga riset perikanan budidaya air tawar dan penyuluhan perikanan dalam rangka menghadapi era industri 4.0 dan society 5.0	Menginformasikan terkait keunggulan Laboratorium Uji BRPBATPP pada forum pertemuan ilmiah tingkat nasional maupun internasional dalam rangka menjaring kerjasama	Menginformasikan terkait keunggulan Laboratorium Uji BRPBATPP pada jejaring IPTEK dan SDM di seluruh wilayah Indonesia dalam rangka menjaring kerjasama	Menginformasikan terkait keunggulan Laboratorium Uji BRPBATPP dalam rangka menjaring kerjasama antar lembaga baik nasional maupun internasional	-	-	-

Matrik SWOT BRPBATPP		PELUANG (O)				ANCAMAN (T)		
		Era Industri 4.0 dan Society 5.0	Banyak terdapat forum pertemuan ilmiah tingkat nasional dan internasional	Jejaring IPTEK dan SDM di seluruh wilayah Indonesia	Kerjasama lintas sektoral dan lembaga terkait penyelenggaraan riset perikanan baik nasional maupun internasional	Persaingan dengan tenaga kerja dari luar negeri di era perdagangan bebas	Adanya persyaratan kompetensi bagi tenaga kerja kelautan dan perikanan yang tersertifikasi	Isu lingkungan (climate change, marine debris, IUU fishing, dll) masih menjadi perhatian dunia
	Memiliki sertifikasi lembaga sebagai Pusat Unggulan IPTEK dengan tema “Budidaya Air Tawar”	Memanfaatkan sertifikasi lembaga sebagai Pusat Unggulan IPTEK yang ada untuk melakukan riset maupun menghasilkan PNB dalam rangka meningkatkan performa BRPBATPP sebagai lembaga riset perikanan budidaya air tawar dan penyuluhan perikanan dalam rangka menghadapi era industri	Menginformasikan terkait keunggulan BRPBATPP sebagai PUI dengan tema budidaya air tawar pada forum pertemuan ilmiah tingkat nasional maupun internasional dalam rangka menjaring kerjasama	Menginformasikan terkait keunggulan BRPBATPP sebagai PUI dengan tema budidaya air tawar pada jejaring IPTEK dan SDM di seluruh wilayah Indonesia dalam rangka menjaring kerjasama	Menginformasikan terkait keunggulan BRPBATPP sebagai PUI dengan tema budidaya air tawar dalam rangka menjaring kerjasama antar lembaga baik nasional maupun internasional	-	-	-

Matrik SWOT BRPBATPP		PELUANG (O)				ANCAMAN (T)		
		Era Industri 4.0 dan Society 5.0	Banyak terdapat forum pertemuan ilmiah tingkat nasional dan internasional	Jejaring IPTEK dan SDM di seluruh wilayah Indonesia	Kerjasama lintas sektoral dan lembaga terkait penyelenggaraan riset perikanan baik nasional maupun internasional	Persaingan dengan tenaga kerja dari luar negeri di era perdagangan bebas	Adanya persyaratan kompetensi bagi tenaga kerja kelautan dan perikanan yang tersertifikasi	Isu lingkungan (climate change, marine debris, IUU fishing, dll) masih menjadi perhatian dunia
		4.0 dan society 5.0						

Matrik SWOT BRPBATPP		PELUANG (O)				ANCAMAN (T)		
		Era Industri 4.0 dan Society 5.0	Banyak terdapat forum pertemuan ilmiah tingkat nasional dan internasional	Jejaring IPTEK dan SDM di seluruh wilayah Indonesia	Kerjasama lintas sektoral dan lembaga terkait penyelenggaraan riset perikanan baik nasional maupun internasional	Persaingan dengan tenaga kerja dari luar negeri di era perdagangan bebas	Adanya persyaratan kompetensi bagi tenaga kerja kelautan dan perikanan yang tersertifikasi	Isu lingkungan (climate change, marine debris, IUU fishing, dll) masih menjadi perhatian dunia
	Memiliki hasil riset perikanan yang telah dipatenkan	Memanfaatkan hasil riset yang telah dipatenkan untuk dapat dikerjasamakan dengan industri dalam rangka menghadapi era industri 4.0 dan society 5.0	Menginformasikan terkait hasil riset BRPBATPP yang telah dipatenkan pada forum pertemuan ilmiah tingkat nasional maupun internasional dalam rangka menjaring kerjasama	Menginformasikan terkait hasil riset BRPBATPP yang telah dipatenkan pada jejaring IPTEK dan SDM di seluruh wilayah Indonesia dalam rangka menjaring kerjasama	Menginformasikan terkait hasil riset BRPBATPP yang telah dipatenkan dalam rangka menjaring kerjasama antar lembaga baik nasional maupun internasional	-	-	-

Matrik SWOT BRPBATPP		PELUANG (O)				ANCAMAN (T)		
		Era Industri 4.0 dan Society 5.0	Banyak terdapat forum pertemuan ilmiah tingkat nasional dan internasional	Jejaring IPTEK dan SDM di seluruh wilayah Indonesia	Kerjasama lintas sektoral dan lembaga terkait penyelenggaraan riset perikanan baik nasional maupun internasional	Persaingan dengan tenaga kerja dari luar negeri di era perdagangan bebas	Adanya persyaratan kompetensi bagi tenaga kerja kelautan dan perikanan yang tersertifikasi	Isu lingkungan (climate change, marine debris, IUU fishing, dll) masih menjadi perhatian dunia
	Kemampuan menyelenggarakan sistem penyuluhan terpadu serta kegiatan percontohan penyuluhan	Menyelenggarakan sistem penyuluhan yang dapat meningkatkan kompetensi pelaku utama dalam rangka menghadapi era industri 4.0 dan society 5.0	Menginformasikan terkait kegiatan penyuluhan dan percontohan penyuluhan yang telah dilaksanakan oleh BRPBATPP pada forum pertemuan ilmiah tingkat nasional maupun internasional dalam rangka menjangkau kerjasama	Menginformasikan terkait kegiatan penyuluhan dan percontohan penyuluhan yang telah dilaksanakan oleh BRPBATPP pada jejaring IPTEK dan SDM di seluruh wilayah Indonesia dalam rangka menjangkau kerjasama	Menginformasikan terkait kegiatan penyuluhan dan percontohan penyuluhan yang telah dilaksanakan oleh BRPBATPP dalam rangka menjangkau kerjasama antar lembaga baik nasional maupun internasional	-	-	-

Matrik SWOT BRPBATPP		PELUANG (O)				ANCAMAN (T)		
		Era Industri 4.0 dan Society 5.0	Banyak terdapat forum pertemuan ilmiah tingkat nasional dan internasional	Jejaring IPTEK dan SDM di seluruh wilayah Indonesia	Kerjasama lintas sektoral dan lembaga terkait penyelenggaraan riset perikanan baik nasional maupun internasional	Persaingan dengan tenaga kerja dari luar negeri di era perdagangan bebas	Adanya persyaratan kompetensi bagi tenaga kerja kelautan dan perikanan yang tersertifikasi	Isu lingkungan (climate change, marine debris, IUU fishing, dll) masih menjadi perhatian dunia
K E L E M A H A N (W)	Sarana prasarana riset perikanan yang tersedia masih memerlukan revitalisasi	Merevitalisasi sarana prasarana riset perikanan untuk mendukung kegiatan riset perikanan budidaya air tawar dalam rangka menghadapi era industri 4.0 dan society 5.0	Mengikuti forum pertemuan ilmiah tingkat nasional dan internasional untuk menjaring informasi dalam rangka peningkatan sarana prasarana riset perikanan	Mengikuti Jejaring IPTEK dan SDM di seluruh wilayah Indonesia untuk menjaring informasi dalam rangka peningkatan sarana prasarana riset perikanan	Melakukan kerjasama lintas sektoral dan lembaga terkait penyelenggaraan riset perikanan baik nasional maupun internasional yang dapat memberikan peluang untuk melakukan revitalisasi terkait sarana prasarana riset perikanan	-	-	-

Matrik SWOT BRPBATPP		PELUANG (O)				ANCAMAN (T)		
		Era Industri 4.0 dan Society 5.0	Banyak terdapat forum pertemuan ilmiah tingkat nasional dan internasional	Jejaring IPTEK dan SDM di seluruh wilayah Indonesia	Kerjasama lintas sektoral dan lembaga terkait penyelenggaraan riset perikanan baik nasional maupun internasional	Persaingan dengan tenaga kerja dari luar negeri di era perdagangan bebas	Adanya persyaratan kompetensi bagi tenaga kerja kelautan dan perikanan yang tersertifikasi	Isu lingkungan (climate change, marine debris, IUU fishing, dll) masih menjadi perhatian dunia
	Jumlah publikasi internasional masih terbatas	Meningkatkan publikasi internasional dalam rangka meningkatkan daya saing dan untuk menjaring kerjasama internasional dalam rangka menghadapi era industri 4.0 dan society 5.0	Mengikuti forum pertemuan ilmiah tingkat nasional dan internasional untuk menjaring informasi dalam rangka peningkatan publikasi internasional hasil riset BRPBATPP	Mengikuti Jejaring IPTEK dan SDM di seluruh wilayah Indonesia untuk menjaring informasi dalam rangka peningkatan publikasi internasional hasil riset BRPBATPP	Melakukan kerjasama lintas sektoral dan lembaga terkait penyelenggaraan riset perikanan baik nasional maupun internasional yang dapat memberikan peluang untuk peningkatan publikasi internasional hasil riset BRPBATPP	Meningkatkan publikasi internasional dalam rangka meningkatkan daya saing peneliti BRPBATPP untuk menghadapi tenaga kerja dari luar negeri (termasuk periset) di era perdagangan bebas	-	-

Matrik SWOT BRPBATPP		PELUANG (O)				ANCAMAN (T)		
		Era Industri 4.0 dan Society 5.0	Banyak terdapat forum pertemuan ilmiah tingkat nasional dan internasional	Jejaring IPTEK dan SDM di seluruh wilayah Indonesia	Kerjasama lintas sektoral dan lembaga terkait penyelenggaraan riset perikanan baik nasional maupun internasional	Persaingan dengan tenaga kerja dari luar negeri di era perdagangan bebas	Adanya persyaratan kompetensi bagi tenaga kerja kelautan dan perikanan yang tersertifikasi	Isu lingkungan (climate change, marine debris, IUU fishing, dll) masih menjadi perhatian dunia
	Rasio pelaku utama/usaha terhadap jumlah penyuluh dan penyebarannya belum memadai	Menambah jumlah penyuluh agar dapat memenuhi rasio ideal dalam melakukan penyuluhan terhadap pelaku utama/usaha dalam rangka menghadapi era industri 4.0 dan society 5.0	-	-	-	Menambah jumlah penyuluh agar dapat memenuhi rasio ideal dalam melakukan penyuluhan terhadap pelaku utama/usaha dalam rangka mendorong pelaku utama/usaha KP untuk meningkatkan kompetensi di bidang KP sehingga dapat bersaing dengan	Menambah jumlah penyuluh agar dapat memenuhi rasio ideal dalam melakukan penyuluhan terhadap pelaku utama/usaha dalam rangka mendorong pelaku utama/usaha KP untuk meningkatkan kompetensi melalui sertifikasi bidang KP	-

Matrik SWOT BRPBATPP		PELUANG (O)				ANCAMAN (T)		
		Era Industri 4.0 dan Society 5.0	Banyak terdapat forum pertemuan ilmiah tingkat nasional dan internasional	Jejaring IPTEK dan SDM di seluruh wilayah Indonesia	Kerjasama lintas sektoral dan lembaga terkait penyelenggaraan riset perikanan baik nasional maupun internasional	Persaingan dengan tenaga kerja dari luar negeri di era perdagangan bebas	Adanya persyaratan kompetensi bagi tenaga kerja kelautan dan perikanan yang tersertifikasi	Isu lingkungan (climate change, marine debris, IUU fishing, dll) masih menjadi perhatian dunia
						tenaga kerja asing di era perdagangan bebas		

Matrik SWOT BRPBATPP		PELUANG (O)				ANCAMAN (T)		
		Era Industri 4.0 dan Society 5.0	Banyak terdapat forum pertemuan ilmiah tingkat nasional dan internasional	Jejaring IPTEK dan SDM di seluruh wilayah Indonesia	Kerjasama lintas sektoral dan lembaga terkait penyelenggaraan riset perikanan baik nasional maupun internasional	Persaingan dengan tenaga kerja dari luar negeri di era perdagangan bebas	Adanya persyaratan kompetensi bagi tenaga kerja kelautan dan perikanan yang tersertifikasi	Isu lingkungan (climate change, marine debris, IUU fishing, dll) masih menjadi perhatian dunia
	Peran penyuluh dalam mendampingi pelaksanaan program pembangunan KP belum optimal	Mengoptimalkan peran penyuluh dalam melakukan pendampingan program pembangunan KP dalam rangka menghadapi era industri 4.0 dan society 5.0	-	Mencari informasi pada jejaring SDM di seluruh wilayah Indonesia terkait cara mengoptimalkan peran penyuluh dalam mendampingi program pembangunan KP	-	-	-	Mengoptimalkan peran penyuluh dalam melakukan pendampingan program pembangunan KP termasuk di dalamnya yang terkait dengan isu lingkungan

MATRIKS INDIKATOR KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2020-2024

Satker : BRPBATPP

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	TARGET					INDIKASI PENDANAAN				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Kelompok pelaku utama/usaha yang disuluh	Kelompok	3.511	3.464	3.546	3.800	3.864	8.909.091.000	8.494.397.000	8.550.230.000	7.765.280.000	7.896.064.000
		Jumlah Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang mendapatkan Percontohan Penyuluhan	Kelompok	0	0	0	5		-	-	-	2.500.000.000	500.000.000
	Terselenggaranya Layanan Dukungan Manajemen Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Layanan ketatausahaan pelatihan dan penyuluhan perikanan	Layanan	1	1	1	1	1	129.254.000	-	-	-	-
Riset Perikanan	Tersedianya Teknologi Hasil Riset Perikanan	Jumlah Teknologi Hasil Riset Perikanan	Paket/ Produk	5	5	0	0	0	1.417.196.000	523.718.000	-	-	-
	Tersedianya Produk Biologi Hasil Riset Perikanan	Jumlah Produk Biologi Hasil Riset Perikanan	Paket/ Produk	1	2	0	0	0	438.195.000	342.128.000	-	-	-
	Tersedianya Data dan/atau Informasi Hasil Riset Perikanan	Jumlah Data dan/atau Informasi Hasil Riset Perikanan	Paket/ Rekomendasi Kebijakan	1	1	0	0	0	381.195.000	119.927.000	-	-	-
	Tersedianya Sarana Prasarana Riset Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Riset Perikanan	Unit	1	2	1			132.824.000	410.738.000	190.000.000	-	-
	Terselenggaranya Layanan Dukungan Manajemen Lingkup riset perikanan	Jumlah layanan ketatausahaan riset perikanan	Layanan	1	1	1	1	1	523.914.000	-	-	-	-
	Tersedianya Layanan Perkantoran	Jumlah Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1	45.367.985.000	-	-	-	-
Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	Terselenggaranya Pemenuhan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Lingkup BRSDMKP	Jumlah Pemenuhan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Lingkup BRSDMKP	Layanan	0	2	1	1	1	-	38.596.223.000	35.234.181.000	28.846.338.000	28.846.338.000
		Jumlah Pemenuhan Layanan Perkantoran Lingkup BRSDMKP	Layanan	0	1	1	1	1	-	5.156.600.000	4.096.092.000	7.450.988.000	7.450.988.000
	Terselenggaranya Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	Nilai PM PRB BRSDMKP	Layanan	0	1	1	1	1	-	398.303.000	313.820.000	567.642.000	567.642.000
		Indeks Profesionalitas ASN											
		Nilai Penilaian Mandiri (PM) SAKIP											
		Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)											
		Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar											
		Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja											
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)											
		Nilai Kinerja Anggaran (NKA)											

Bogor, 11 Januari 2023

Pt. Kepala Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan



Dr. IRI Sri Pudji Sinarni Dewi, M.Si.

NIP.19751216 200312 2 002